

11

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 13

TAHUN 2007

Nasib Timnas BBN dalam Penentuan

NASIB Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati akan ditentukan hari ini. Ada dua alternatif, yakni dibubarkan dan dibentuk tim pengawas atau kewenangan badan diperluas hingga bisa mengambil keputusan kebijakan.

Sekretaris Timnas Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) Evita Legowo kepada *Media Indonesia* di Jakarta, kemarin, mengatakan tugas tim sudah selesai. Tim tinggal menyampaikan hasil evaluasi kerja kepada Presiden.

Timnas Pengembangan BBN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Tugas utamanya antara lain menyusun cetak biru pengembangan BBN, menyusun peta jalan pengembangan BBN, dan menyiapkan rumusan langkah pengembangan BBN untuk ditindaklanjuti instansi terkait. Sampai saat ini, timnas telah mengajukan 15 rekomendasi terkait dengan pengembangan BBN kepada pemerintah. Rekomendasi itu antara lain penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengurangan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). (Eva/E-4)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2007

Sumur Migas Ujung Pangkah Terbakar

SUMUR pengembangan minyak dan gas bumi (migas) yang dioperasikan Hess dengan nama MTR-1 di Ujung Pangkah, lepas pantai Jawa timur, terbakar, Kamis (14/6) malam. Berdasarkan keterangan juru bicara Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas Amir Hamzah, kebakaran tersebut terjadi pada pukul 21.35 WIB.

Kebakaran timbul dari dalam gudang kimia lumpur. Namun, itu dapat diatasi sekitar 01.50 dini hari tanpa ada korban. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih diselidiki dan jumlah kerugian sedang dihitung. Akibat kebakaran itu, pengeboran dihentikan untuk sementara. Produksi Ujung Pangkah baru mencapai 40 juta kaki kubik (mmscfd) dan 5.000 barel minyak dan kondensat. Pada akhir tahun ini, produksi gas diharapkan bisa mencapai 100 mmscfd. Hess memiliki kontrak penjualan gas dengan PT PLN (persero) sebanyak 100 mmscfd selama 20 tahun. (Eva/E-4)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2007

Shell Gelar
Program
Bina UKM

JAKARTA (Media): Perusahaan migas, Shell Indonesia siap mengucurkan dana Rp125 juta untuk memodali lima pengusaha muda pada tahun ini.

Kelima pengusaha muda itu terlebih dahulu harus lulus seleksi program bina usaha YES (*young entrepreneurs start-up*) tahun ini. Setiap pemenang akan mendapat Rp25 juta plus bimbingan konsultan profesional.

Program itu akan dimulai pada 19 Juni mendatang, bekerja sama dengan Indonesia Business Links, Standard Chartered Bank, Mc Kinsey and Company, dan Yayasan Progressio.

"Dengan brand ketiga perusahaan itu saja (Shell, Standard Chraterd Bank, dan Mc Kinsey) sudah memberi kenyamanan bagi pemodal untuk investasi," ujar CEO Shell Indonesia Darwin Silalahi dalam *prelaunching* program tersebut di Jakarta, kemarin.

Syarat yang ditetapkan Shell dalam kompetisi ini hanya dua. Pertama, usaha harus baru berjalan maksimal dua tahun. Kedua, pengusaha yang boleh ikut serta usianya 18-32 tahun.

Berdasarkan keterangan YES Programme Manager Mohamad Fahm, modal dan bimbingan akan diberikan selama dua tahun. Selanjutnya akan dievaluasi apakah masih butuh pendampingan atau tidak.

Terkait dengan bisnis ritel migas di Indonesia, Shell juga menyatakan ketertarikan masuk di bisnis distribusi RON 88 atau biasa dikenal bensin premium.

Selama ini Shell baru menjual produk BBM (bahan bakar minyak) kelas atas atau nonsubsidi seperti RON 92 (sekelas pertamax) dan RON 95 (sekelas pertamax plus).

Namun untuk saat ini, Shell seperti dikatakan Darwin masih menunggu kepastian regulasi yang sedang dibahas pemerintah. "Kalau regulasi sudah lebih bagus dan memungkinkan, kami akan masuk. Kami tentu tertarik untuk masuk

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2007

LKPP Disclaimer Karena Rekening Liar

Sandy Romualdus
NERACA

Jakarta - Pernyataan *disclaimer* BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) selama tiga tahun berturut-turut diduga berkaitan erat dengan munculnya rekening liar di sejumlah departemen.

"Ini harus diperbaiki, walau dalam proses transisi, harus ada target supaya tidak *disclaimer* lagi karena menciptakan persepsi buruk terhadap pemerintah sebagai penyelenggara keuangan negara," ujar Sri Adiningsih, pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) saat dihubungi Neraca, kemarin.

Dia menanggapi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2006 yang disebutkan *disclaimer* (tidak dapat menyatakan pendapat). Opini BPK serupa juga diberikan terhadap LKPP dua tahun sebelumnya (2004 dan 2005).

Sri Adiningsih mengatakan sistem pelaporan keuangan pemerintah saat ini dalam prosesi

transisi, tetapi poin penting yang harus diperhatikan bahwa pemerintah tidak boleh terlalu luwes dengan sistem pelaporan tersebut. Yang segera dilakukan adalah menciptakan sistem pemerintahan yang baru terutama di sektor keuangan negara.

BPK menilai rekonsiliasi anggaran antara Depkeu dan kementerian negara/lembaga belum berjalan efektif, sehingga menimbulkan perbedaan angka yang tidak dapat ditelusuri kebenarannya. Walaupun menggunakan sistem teknologi informasi yang beragam, pelaporan tersebut belum terintegrasi dengan baik. BPK akan menyerahkan laporan opini *disclaimer*-nya terhadap LKPP 2006 kepada DPR besok.

Menurut Sri Adiningsih, jika pada tahun selanjutnya juga dinyatakan LKPP *disclaimer* maka ini kondisi ini akan sulit bagi pemerintah untuk membangun akuntabilitas keuangan negara. Dia menilai sikap BPK yang menyatakan opini tersebut akibat dari sistem keuangan negara yang tidak efektif lagi, terkait juga dengan keberadaan rekening liar di lingkungan kementerian/lembaga

(L/K) yang sering menjurus kepada praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Kalau *disclaimer* lagi tandanya langkah pemerintah terutama departemen keuangan masih terbentur dengan praktek korupsi di lingkungannya sendiri," ujarnya.

Pendapat Sri Adiningsih ini sejalan dengan pemikiran Ketua BPK Anwar Nasution, yang juga menyoroti belum diterapkannya sistem perbendaharaan tunggal sebagaimana diatur dalam UU Perbendaharaan Negara, sehingga mengakibatkan rekening-rekening pemerintah tidak dapat dikendalikan karena tersebar di berbagai bank dan dimiliki atas nama ribuan pejabat negara. Selain adanya penerimaan negara dari hasil migas yang tidak seluruhnya diserahkan ke kas negara, juga sebagian digunakan untuk pengeluaran yang tidak masuk dalam APBN.

Sebaliknya Menkeu Sri Mulyani Indrawati terkesan menyalahkan undang-undang sehubungan dengan opini BPK itu. Menurut dia, ada tiga kelemahan yang mempengaruhi munculnya opini BPK yakni kelemahan dalam penerapan UU Keuangan Negara

yang baru diimplementasikan pada 2005. Kemudian adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal instansi-instansi pemerintah dan ketiga adalah tingkat kepatuhan yang kurang atas ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah harus memperbaiki pengelolaan penerimaan negara. "Oleh karena itu kita integrasikan sistem informasi di Ditjen Pajak yang dulu namanya MP3 dan kemudian di Bea Cukai yang dulu disebut *electronic data exchange*, juga integrasi sistem penerimaan di Ditjen Perbendaharaan menjadi satu yang disebut modul penerimaan negara yang dipakai sekarang," katanya akhir pekan lalu.

Sementara hal-hal yang mengenai pengelolaan belanja pemerintah pusat, juga akan diperbaiki terutama sistem koordinasi antara K/L juga dengan pemerintah daerah. "Ini kita lakukan terutama untuk memperbaiki berbagai laporan keuangan yang dikelola atau dilakukan oleh kementerian lembaga lalu dikonsolidasikan oleh Menkeu sebagai bendahara umum negara," tandas Menkeu.●

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 114

TAHUN 2007

**Shell Berminat Jual
Bensin Ron 88**

JAKARTA — PT Shell Indonesia menyatakan minatnya mendistribusikan bahan bakar bensin jenis ron 88 nonsubsidi. Country Chairman & President Director Shell Indonesia Darwin Silalahi mengatakan Shell akan melihat regulasinya terlebih dulu.

"Ada regulasi yang masih perlu kami pelajari dari pemerintah," katanya di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, kemarin.

Saat ini bensin jenis ron 88 hanya diedarkan oleh PT Pertamina (Persero) dengan merek dagang premium dan disubsidi oleh pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 menetapkan volume bahan bakar minyak bersubsidi sebesar 37,9 juta kiloliter, yang terdiri atas premium 17 juta kiloliter, minyak tanah 9,5 juta kiloliter, dan solar 11 juta kiloliter.

Shell juga tertarik untuk mengikuti tender distribusi bahan bakar minyak bersubsidi. Namun, Shell menunggu regulasi mengenai hal itu. "Kami menyambut rencana pemerintah yang memungkinkan pemain-pemain baru untuk memberikan BBM bersubsidi. Kalau memang regulasinya sudah lebih bagus dan memungkinkan, kami akan masuk," kata Darwin. • NIEKE INDRIHETA

14

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 114

TAHUN 2007

Pembebasan Lahan Blok Cepu Dipercepat

BLORA — Pembebasan tanah untuk proyek minyak dan gas bumi di Blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur, menjadi masalah utama cepat atau tidaknya produksi minyak di lapangan tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro meminta kesadaran banyak pihak agar proyek besar itu tidak terganggu. "Persoalan utama adalah tanah. Jadi saya mohon kepada masyarakat bisa membantu agar Blok Cepu bisa cepat beroperasi," ujarnya kemarin.

Dia mengatakan kegiatan produksi Cepu tidak akan mundur dari jadwal pada akhir 2008. "Produksi pada

akhir 2008 atau awal 2009, tapi masalah tanah masih menjadi kendala utama," katanya.

Purnomo mengatakan pihaknya mendesak agar tim pembebasan tanah di daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, segera menetapkan harga tanahnya. Dalam hal ini, yaitu tim daerah (Tim 9), yang punya keputusan menetapkan harga tanah. Apalagi sekarang harga tanah di kawasan Blok Cepu sudah melonjak tinggi. "Inilah yang saya minta agar tim daerah menetapkan harga tanahnya," ujarnya.

Hingga kini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro be-

lum menetapkan harga tanah. Asisten Tata Praja Kabupaten Bojonegoro Kamsoeni mengatakan, "Yang menentukan harga (tanah) tim gabungan."

Para pemilik tanah yang akan dibebaskan pun bingung. Sahidin, petani asal Mojodelik, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, pemilik tanah 2,5 hektare yang terkena Blok Cepu, mengaku belum akan melepas tanahnya. Alasannya, hingga kini belum ada penetapan harga. Padahal dia mengakui sudah banyak pemodal yang menawarkan tanahnya untuk dijual. "Tapi hingga kini belum juga saya jual," katanya. ● SUJATMIKO

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 38

TAHUN 2007

TANTANGAN BIOENERGI

Dari Ideologi sampai Praksis Kebijakan

Oleh BUSTANUL ARIFIN

Sejak harga minyak bumi dunia melambung di atas 70 dollar AS per barrel, wacana energi alternatif yang berasal dari bahan hayati (bioenergi) berkembang sangat pesat.

Hampir seluruh negara di dunia yang memiliki lahan pertanian berusaha melakukan riset untuk merumuskan kebijakan dan merancang rekayasa teknologi dan melaksanakan mimpi bioenergi. Negara penghasil jagung dan tebu mengarahkan kebijakannya pada produksi etanol, sedangkan produsen kelapa sawit dunia fokus kepada bahan bakar diesel atau yang umum dikenal dengan biodiesel.

Indonesia pun tidak ketinggalan melakukan hal yang sama. Beberapa lembaga penelitian dan perguruan tinggi telah menemukan formula dan komposisi bahan bakar nabati yang ideal bagi kondisi bahan baku produksi komoditas pertanian, seperti kelapa sawit, pohon jarak pagar atau jarak kaliki, tebu, jagung, dan ubi kayu.

Banyak pula badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta nasional telah melakukan langkah yang lebih nyata, misalnya merancang beberapa inisiatif untuk mewujudkan teknologi yang berbasis bioenergi.

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan dua kebijakan penting tentang energi alternatif ini. Kebijakan itu adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN atau *biofuel*).

Sebagai suatu peraturan yang bersifat ke dalam, Inpres Nomor 1/2006 itu diberikan kepada 15

nomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, dan Menteri Perindustrian.

Kemudian, Menteri Perdagangan, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Negara BUMN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, gubernur, dan bupati/wali kota.

Tema instruksi yang dikeluarkan adalah: "mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuels*) sebagai bahan bakar lain".

Sempat terdapat diskusi terbuka yang agak ramai bahwa beberapa instansi yang sangat relevan dalam penyediaan dan pemanfaatan BBN ini tidak termasuk yang memperoleh instruksi dari Presiden, misalnya Menteri Pendidikan Nasional yang seharusnya mampu mengembangkan kurikulum tentang energi alternatif.

Menko Kesra, yang seharusnya mampu mengaitkan pengembangan BBN dengan upaya penanggulangan kemiskinan, atau bahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dapat berperan dalam kebijakan pertanahan atau tata guna lahan yang mendukung pengembangan BBN dan sebagainya.

Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penyediaan atau pengembangan energi alternatif ini tidaklah mudah sebagaimana diuraikan dalam artikel ini.

Tantangan itu bersifat ideologis atau pemikiran ilmiah, terutama persaingan pangan *versus* energi (atau tepatnya antara kebutuhan manusia vs kebutuhan mesin). kontroversi ramah ling-

untuk menyatukan derap langkah segenap instansi pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah digariskan.

Pangan vs energi

Tantangan ideologis ini mulai terasa sejak setahun terakhir dan semakin nyata pada tahun 2007. Pertumbuhan permintaan *biofuel* dunia yang sangat besar dan sama sekali di luar dugaan telah melambungkan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia dan membuat sengsara konsumen minyak goreng di dalam negeri.

Berdasarkan data terbaru dalam Commodity Market Review Bank Dunia per Juni 2007, harga CPO dunia telah melampaui 772 dollar AS per ton, suatu rekor tertinggi dalam 23 tahun terakhir.

Konsumsi *rapeseed* di pasar global, substitusi paling dekat CPO sebagai bahan baku *biofuel*, juga sangat signifikan dalam menaikkan harga CPO di atas 60 persen dibandingkan dengan harga rata-rata 478 dollar AS pada tahun 2006.

Dampak di dalam negeri telah dirasakan masyarakat luas, terutama oleh kelompok miskin, karena harga minyak goreng masih sangat tinggi dan berkisar Rp 9.000 per kilogram walaupun pemerintah telah berusaha menurunkannya.

Sulit terbayangkan apabila harga-harga minyak nabati dunia terus melambung dan pasti memengaruhi struktur pasar dalam negeri di negara-negara berkembang.

Sebenarnya, apabila negara mampu merumuskan aransemen kelembagaan yang lebih beradab, kenaikan harga CPO dunia itu justru dapat memberikan *wind-fall profit* bagi petani kelapa sawit, bukan menjadi beban seperti sekarang.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2007

Shell Berminat Terjun Ke Bisnis BBM Subsidi

Jakarta, Probisnis RM

Setelah membuka beberapa cabang di Jakarta, Shell Indonesia berminat untuk menggeluti bisnis distribusi RON 88 atau BBM jenis Premium yang kini sedang dikaji kemungkinannya untuk dilepas ke pasar. "Akan sangat bagus bila kami bisa juga berikan bahan bakar di luar premium yang kami jual," ujar CEO Shell Indonesia Darwin Silalahi usai prelaunching program bina usaha Shell di Jakarta, kemarin.

Produk premium Shell yang dimaksud adalah produk BBM kelas

atas atau non subsidi seperti RON 92 (sekelas Pertamina) dan RON 95 (sekelas Pertamina Plus). Namun, pihaknya masih menunggu kepastian regulasi yang sedang dibahas pemerintah. "Kalau regulasi sudah lebih bagus dan memungkinkan kami akan masuk. Kami tentu tertarik untuk masuk juga," ujarnya.

Darwin juga menegaskan kembali minat Shell untuk ikut mendistribusikan BBM bersubsidi. "Dan tentunya kami sangat menyambut rencana-rencana pemerintah untuk memungkinkan pemain-pemain baru untuk juga bisa

berikan BBM subsidi," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Shell menyatakan kesiapannya memodali Rp 125 juta untuk lima pengusaha muda yang lulus seleksi program bina usaha YES! (Young Entrepreneurs Start-UP) tahun ini. Setiap pemenang akan mendapat Rp 25 juta plus bimbingan konsultan profesional.

Syaratnya adalah usaha baru berjalan maksimal dua tahun dan pengusaha bersangkutan berumur 18-32 tahun. Program ini akan dimulai pada 19 Juni mendatang dengan bekerjasama dengan Indonesia Business Links, Standard Chartered Bank, Mc Kinsey and Company, dan Yayasan Progresio. "Dengan brand 3 perusahaan itu saja (Shell, Standard Chartered Bank, dan Mc Kinsey) saja sudah memberi comfort bagi pemodal untuk investasi," ujar Darwin.

YES Programme Manager Mohamad Fahmi menjelaskan, modal dan bimbingan akan diberikan selama 2 tahun. Selanjutnya akan dievaluasi apakah masih butuh pendampingan atau tidak. "Penyerapan modalnya tergantung setiap usaha," ujarnya. Pada 2007 hingga 2008 Shell akan menggelar Shell Bright Ideas Workshops di 24 lokasi di Indonesia (setiap tahunnya 12 lokasi), 2 kali Shell Business Start-Up Awards pada November 2007 dan 2008. ● BIS



FILANTROPI CLUB. Untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi, kemarin dideklarasikan piagam pembentukan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI). Tampak Ketua Badan Pengurus PFI Ismid Hadad (tengah) dan Imam B Prasodjo (kanan) saat peluncuran PFI di Jakarta.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2007

Kapal Tanker Pertamina Digarap Jiangu



■ Ari Soemarno

SETELAH melalui proses seleksi, Jiangu Eastern Shipyard (JES) memenangkan pembangunan dua unit kapal tanker Pertamina senilai US\$ 61.490.000. Kapal yang akan digunakan untuk mengangkut minyak tanah dengan kapasitas 85.000 LTDW (Long Ton Dead Weight) itu direncanakan bisa selesai dan dikirim ke Indonesia pada Juli 2010.

Direktur Utama PT Pertamina Ari Soemarno mengatakan, sebelumnya sudah mengundang beberapa perusahaan untuk

mengajukan penawaran, termasuk Hyundai Heav Industry dari Korea. "Pertamina butuh transportasi kapal yang lebih layak untuk menjamin rantai suplai ke pelanggannya," ujarnya dalam penandatanganan kontrak dengan JES di Jakarta, kemarin.

Kapal yang dibuat JES ini memiliki masa guna selama lebih dari 25 tahun. Karena pasar dalam negeri belum ada yang mampu membangunnya, maka diserahkan ke pasar internasional.

Saat ini, lanjut Ari, kepemilikan Pertamina atas kapal-kapalnya baru 25 persen, sedangkan 75 persen sisanya menyewa. "Pertamina butuh lebih banyak kapal untuk meningkatkan posisi tawarnya, sehingga lebih kompetitif," tandasnya.

Di tempat sama, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Faisal menambahkan, tahun ini saja Pertamina membutuhkan delapan kapal tanker dengan ukuran yang berbeda-beda. Sebanyak tiga kapal sudah dipenuhi oleh Koja Bahari. Dan kini Pertamina sedang menender 2 kapal LPG.

Faisal menyatakan, dana pembelian kapal ini diambil dari dana internal Pertamina. "Beli dari uang Pertamina. Sudah masuk RKAP tahun sebelumnya. Kan sudah *planning* jangka panjang," ujarnya. ● IU

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 34		TAHUN 2007

KONSUMSI

Terkendala Suplai yang Terbatas

Nyonya Sriati (40) begitu antusias saat berbicara tentang biopremium. Bahan bakar tersebut dinilainya berkualitas tinggi. "Mesin mobil saya jadi lebih halus setelah menggunakan biopremium. Makanya, sekalipun harganya mahal, saya tidak peduli. Tetapi, tidak mudah mendapatkan biopremium," kata Sriati.

Sriati adalah pemilik dan pengendara mobil BMW seri 320i. Mula-mula dia menggunakan bahan bakar pertamax untuk mobilnya, tetapi beberapa bulan kemudian beralih ke biopremium. Langkah itu dilakukan setelah membaca informasi dari berbagai media cetak.

Setelah memakai biopremium, Sriati merasakan ada perbedaan signifikan dengan pertamax. Jika menggunakan pertamax biasa mesin mobilnya terasa berbunyi tidak normal. Bahkan, gerakan mobil pun seperti berat dan kaku. Sebaliknya, saat menggunakan biopremium, bunyi mesin mobil terasa begitu halus dan lebih bertenaga.

"Itu sebabnya saya begitu ketagihan untuk menggunakan biopremium. Harga setiap liter Rp 6.300 pun saya berani beli sebab mesin mobil menjadi lebih terawat dan bagus untuk kepentingan jangka panjang," ujar Sriati.

Untuk mendapatkan bahan bakar berkualitas tinggi itu, Sriati pun rela setiap hari mendatangi stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Permata Hijau. Padahal, dia tinggal di Pejompongan. Biaya yang dihabiskan dalam sekali mengisi biopremium minimal Rp 250.000.

Kualitas bahan bakar alternatif minyak bumi memang prima. Untuk biodiesel pun sama. Itu terungkap dari ekspedisi uji coba kendaraan dengan menggunakan bahan bakar biodiesel yang dilakukan Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Uji coba itu menggunakan dua Toyota Inova mengelilingi Nanggroe Aceh Darussalam pada akhir Januari 2007.

Sepanjang 1.000 kilometer perjalanan, getaran mesin Kijang Innova berbahan bakar campuran biodiesel lebih halus dibandingkan yang berbahan bakar solar murni. Minimnya getaran tentu berpengaruh pada kenyamanan berkendara.

"Dalam operasional kendaraan, faktor getaran sangat pen-

ting. Adanya getaran memengaruhi tingkat kenyamanan penumpang dalam kendaraan. Idealnya, getaran sebuah kendaraan tidak sampai di ruang penumpang. Meski tetap saja sampai di ruang penumpang, sebisa mungkin getaran kendaraan diminimalisasi sekecil mungkin," kata teknisi dari Auto 2000 PT Astra Internasional, Habibullah.

Pengemudi kendaraan biodiesel, Sidik Purnomo (34), menyebutkan, getaran di ruang penumpang tidak banyak. Hal itu berbeda ketika dia mengemudi kendaraan solar. Hal yang sama disampaikan Ardi (32), pengemudi yang mengikuti ekspedisi. "Saat awal menghidupkan mesin, kendaraan solar lebih kasar daripada kendaraan biodiesel," kata Ardi.

Sulit didapat

Harus diakui, bahan bakar alternatif, seperti biopremium dan biodiesel, memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan premium dan solar. Dampaknya adalah antusiasme masyarakat untuk menggunakan kedua jenis bahan bakar tersebut menjadi begitu tinggi.

Kendati demikian, realitas tersebut tidak sebanding dengan distribusi kepada konsumen. Setiap kali mereka mendatangi SPBU, konsumen selalu dikecewakan dengan minim dan ketiadaan stok biopremium dan biodiesel.

Akibatnya, semangat konsumen pun cenderung merosot. Pilihan selanjutnya adalah beralih ke bahan bakar lain.

"Terang terang, saya termasuk konsumen biopremium yang kecewa, karena semakin hari saya semakin sulit mendapatkan biopremium di SPBU. Kelangkaan ini membuat saya terpaksa berhenti berlangganan dan mengalihkan ke Shell," kata Sriati.

Kasus minimnya suplai hendaknya tidak terulang kembali jika menginginkan biopremium dan biodiesel menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Merealisasikan impian ini tidaklah mudah sebab berjuta kendala selalu menghadang.

Untuk itu, semua pihak harus segera memberikan perhatian serius dalam pengembangan dan peningkatan energi alternatif berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Langkah tersebut bukan semata-mata mengandalkan semangat dan janji, tetapi juga menuntut dilipatgandakan komitmen dan implementasi terhadap investasi.

Investasi itu tidak hanya sebatas proses produksi, tetapi pengolahan produk yang langsung dinikmati masyarakat. Dengan demikian, biodiesel dan biopremium ini benar-benar menjadi milik masyarakat luas dan bagian terpenting dari kehidupan ekonomi nasional.

(JANNES EUDES WAWA/ANDY RIZA HIDAYAT)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> ● BISNIS INDONESIA ○ INVESTOR DAILY ○ KOMPAS ○ KORAN TEMPO ○ MEDIA INDONESIA ○ NERACA ○ PIKIRAN RAKYAT ○ RAKYAT MERDEKA ○ REPUBLIKA ○ SUARA KARYA 	<ul style="list-style-type: none"> ○ SEPUTAR INDONESIA ○ SUARA PEMBARUAN ○ SINAR HARAPAN ○ TABLOID KONTAN ○ THE JAKARTA POST ○ MAJALAH GATRA ○ MAJALAH TEMPO ○ MAJALAH TRUST ○
--	---

KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3 TAHUN 2007

Operasi Blok Pangkah terganggu akibat kebakaran

Oleh RUDI ARIFFIANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Kegiatan produksi migas di lapangan Ujung Pangkah yang dioperasikan oleh Amerada Hess, perusahaan migas asal AS, terhenti sementara menyusul terjadinya kebakaran di sumur pengembangan UPA-11 pada Kamis pukul 21.35 WIB.

"Keadaan sudah dapat dikendalikan jam 01.50 WIB. Tidak ada korban, tapi kegiatan pengeboran dihentikan, sehingga kegiatan produksi terganggu," ujar Deputy Direktur Operasional BP Migas Dodi Hidayat melalui layanan pesan singkat, kemarin.

Menurut dia, kebakaran terjadi pada sebagian kapal tong-

kang (*barge*) pendukung pengeboran, tepatnya dalam gudang kimia lumpur. Tidak disebutkan berapa nilai kerugian akibat kebakaran.

Sementara itu, Artis Waluyo, Wakil Direktur Urusan Pemerintah dan Hubungan Eksternal Hess, mengatakan sejak teratasinya kebakaran pada pagi dini hari, sumur langsung kembali berproduksi secara normal. "Api tidak mengganggu produksi di sumur Ujung Pangkah," ujarnya.

Sebelum terjadinya kebakaran, produksi sumur tersebut mencapai 40 MMscfd (million standard cubic feet per day) untuk gas dan 5.000 barel per hari untuk minyak beserta kon-

Profil Blok Pangkah	
Lokasi	: Lepas pantai Jawa Timur
Operator/pemilik	: Amerada Hess (75%) & ConocoPhillips (25%)
Tanda tangan kontrak	: Mei 1996
Status	: Produksi

Sumber: Diolah

densatnya. Pengeboran saat ini berada pada kedalaman 5.900 kaki dari target 6.633 kaki.

Cadangan minyak dan gas bumi di blok ini ditemukan sejak November 1998 dan mulai berproduksi sejak April 2007. Blok Pangkah diduga menyimpan cadangan gas sebesar 440 miliar kaki kubik (*billion cubic feet/BCF*), yang diperkirakan mampu memasok kebutuhan gas PT Pembangkitan Jawa Bali, khususnya Pembangkit

Listrik Tenaga Uap dan Gas (PLTGU) Gresik, sebesar 100 MMscfd selama 21 tahun.

Hess memasok seluruh produksinya untuk PT Pembangkitan Jawa-Bali yang digunakan perusahaan itu untuk menjalankan pembangkit listrik.

Pasok terganggu

Bagiyo Riawan, Direktur Operasi PJB, menuturkan pasokan gas dari Hess ke PJB

belum normal kembali. "Pasokan gas dari Hess untuk PJB belum mulai kembali," ujarnya, seperti dikutip *Bloomberg*.

Saat ini, Blok Pangkah masih dimiliki bersama oleh Amerada Hess 75% yang sekaligus bertindak sebagai operator, dan ConocoPhillips 25%. Belakangan Conoco hendak melepas sahamnya melalui proses tender.

Lima perusahaan dikabarkan telah tercatat sebagai penawar dalam tender, termasuk di antaranya perusahaan migas dalam negeri Ina International Co.

Namun, belakangan ini Conoco cenderung memberi sahamnya untuk mitra kerja se-negara itu.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 34

TAHUN 2007

PERTAMINA

Masih Setengah Hati

Bagi PT Pertamina (Persero), memelopori penggunaan bahan bakar nabati atau yang lebih populer dengan sebutan biofuel merupakan sebuah dilema. Ibarat buah simalakama, dimakan ibu mati, tak dimakan bapak yang mati.

Oleh RUNIK SRI ASTUTI

Pada satu sisi, Pertamina dituntut menyosialisasikan pemakaian biofuel sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan, dengan harapan bisa mengurangi tingkat ketergantungan pada energi fosil yang jumlahnya semakin menipis.

Akan tetapi, pada sisi yang lain, tingginya harga etanol dan minyak sawit (CPO) sebagai bahan baku biofuel di pasar internasional mengakibatkan Pertamina menanggung kerugian yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Kerugian itu dihitung berdasarkan selisih harga antara bahan baku biofuel dan harga jual di pasar lokal, khususnya untuk jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Besarnya kerugian itu akan meningkat seiring peningkatan volume penjualan biofuel sehingga untuk menekannya, penjualan harus dibatasi. Itu artinya tujuan untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada energi fosil akan sulit dicapai. Padahal, biofuel merupakan satu-satunya jalan yang cukup aman ditempuh untuk menekan krisis energi yang mulai melanda.

Menjadi rahasia umum bahwa Indonesia saat ini tidak lagi menjadi eksportir minyak mentah, melainkan justru sebagai net importir. Badan Pusat Statistik menyebutkan, tingkat ketergantungan impor minyak kita sudah mencapai 20-30 persen dari total kebutuhan dalam negeri.

Ketika impor ini semakin besar, neraca pembayaran negara pun menjadi tidak seimbang. Apalagi BBM merupakan komoditas yang masih disubsidi oleh pemerintah. Biaya yang harus dikeluarkan untuk belanja BBM membengkak menjadi dua kali lipat.

Menyadari hal itu, maka memproduksi dan memasarkan biofuel bagi Pertamina tidak lagi menjadi tuntutan, melainkan sebuah kebutuhan.

Akan tetapi, pada praktiknya mengembangkan biofuel ternyata tidaklah semudah membaca teorinya. Meskipun boleh dibilang Indonesia adalah negara yang paling akhir mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan ini.

Beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Brasil, Jepang, India, Kolombia, Thailand, Swedia, Australia, bahkan China, sudah menerapkannya sejak lama. Brasil, misalnya, telah menjadi produsen dan pengguna terbesar sejak tahun 1975 melalui program Proalcool yang tersohor.

Di Indonesia, penerapan kebijakan penggunaan biofuel ditandai dengan peluncuran biosolar pada 20 Mei 2006 di Ja-



Masyarakat pengguna bensin biopremium antre di SPBU Jalan Mayjen Wiyono, Kota Males (9/6). PT Pertamina mengaku bisnis penjualan produk biofuel, seperti biopertamax, biopren biosolar, belum menguntungkan.

karta. Dilanjutkan kemudian di Surabaya pada 12 Agustus 2006. Berikutnya secara berturut-turut diluncurkan produk biopremium dan biopertamax pada tahun yang sama.

Kepala Divisi Pemasaran PT Pertamina (Persero) Djaelani Soetomo di Surabaya memaparkan, hingga saat ini pembelian biosolar baru dapat dilayani di 201 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di wilayah Jabodetabek dengan volume penjualan rata-rata 3.600 kiloliter (kl) per bulan.

Sedangkan di Surabaya, penjualan biosolar yang merupakan produk campuran antara 95 persen solar murni dan 5 persen CPO hanya bisa ditemukan di 15 SPBU. Volume penjualan rata-rata per bulan sekitar 1.650 kl.

Di seluruh negeri, biopremium yang merupakan hasil pencampuran 95 persen premium murni dan 5 persen etanol hanya bisa ditemukan di SPBU 54 651 43 Jalan Mayjen Wiyono, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan volume penjualan rata-rata 320 kl per bulan.

Sementara biopertamax (terdiri dari 3 persen etanol dan 97 persen pertamax murni), yang sebelumnya hanya dipasarkan di empat SPBU di Jakarta, mulai 11 Juni 2007, diperluas di lima SPBU di Surabaya dan tiga SPBU di Malang. Adapun volume rata-rata penjualan sekitar 10 kl per hari di Jakarta dan diprediksi sekitar 5 kl per hari di Surabaya dan Malang.

Merugi

Pertamina berjanji akan terus memperluas jaringan distribusi *biofuel* di Indonesia secara bertahap, dengan catatan bisnis tersebut menguntungkan. Sayangnya, ekspansi usaha yang baru dijalankan dalam waktu satu tahun itu belum menguntungkan, kecuali biopertamax.

Tingginya harga CPO dan etanol tidak sebanding dengan harga jual di dalam negeri. Djaelani mengatakan, saat ini harga CPO di pasar internasional mencapai 800 dollar AS per ton, jauh melampaui harga minyak mentah yang hanya 70 dollar AS per barrel.

Pada masa CPO langka seperti sekarang ini, persaingan harga makin ketat dengan produsen minyak goreng dan produsen industri lainnya yang berbahan baku minyak sawit.

"Bagaimana mungkin penjualan *biofuel* bisa efektif apabila harga minyak mentah (energi fosil) jauh lebih murah. Sementara tujuan dari penggunaan *biofuel* itu sendiri adalah untuk mengurangi defisit anggaran akibat tingginya ekspor minyak mentah," ujarnya.

Kerugian Pertamina semakin

parah ketika pemerintah tidak memberi subsidi untuk pembelian *biofuel* berupa CPO dan etanol, padahal biosolar dan biopremium tersebut harus dijual dengan harga subsidi, yakni masing-masing Rp 4.300 per liter dan Rp 4.500 per liter. Pemerintah hanya menyubsidi solar dan premium murni.



Untuk biopertamax, sasaran konsumennya adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki mobil keluaran terbaru.

Ironinya, subsidi untuk pembelian solar murni yang digunakan sebagai campuran biosolar sejak Januari sampai Mei 2007 belum dibayarkan. Besarnya tunggakan telah mencapai Rp 220 miliar.

Tunggakan itu dihitung berdasarkan selisih harga jual solar internasional sebesar Rp 7.000 per liter dengan harga jual biosolar sama dengan harga solar murni di dalam negeri Rp 4.300 per liter. Sebesar 2,5 persen dari selisih harga tersebut, yakni Rp 2.700, sama dengan nilai subsidi per liter biosolar yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina.

Tunggakan pembayaran subsidi semakin membengkak seiring meningkatnya volume penjualan biosolar. Sedangkan desakan pencairan subsidi tak kunjung membuahkan hasil. Untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan tersebut, Pertamina pun mengambil inisiatif sendiri.

Sejak akhir Januari 2007 mereka telah mengurangi volume *biofuel* sebagai campuran biosolar. Jika sebelumnya komposisi

CPO mencapai 5 persen dan 95 persennya lagi adalah solar murni, maka kadar CPO itu kini dikurangi menjadi tinggal 2,5 persen. Dengan demikian kadar solar murninya dinaikkan menjadi 97,5 persen.

Meski terjadi pengurangan, sementara ini diyakini tidak akan menurunkan kualitas biosolar terkait dengan kemampuannya meningkatkan performa kinerja mesin kendaraan dan mengurangi kadar polutan dalam kandungan solar.

Hentikan pengembangan

Upaya lain yang ditempuh Pertamina dalam rangka mengurangi kerugian dari penjualan *biofuel* adalah dengan menghentikan program biopremium meskipun Pertamina mengklaim animo masyarakat cukup bagus dan kesadaran akan penggunaan *biofuel* mulai meningkat.

Selain yang dijual di SPBU Jalan Mayjen Wiyono, Malang, Pertamina tidak akan menambah lokasi penjualan di tempat lain. Volume penjualannya pun dibatasi sesuai dengan rata-rata pembelian di SPBU tersebut, yakni 320 kiloliter per bulan.

Pembatasan penjualan biopremium itu diakui Risa, pemilik SPBU yang menjual biopremium. Menurut Risa, Pertamina tidak mengizinkan pemindahan lokasi SPBU yang melayani pengisian biopremium. Padahal, lokasinya sangat tidak strategis karena berada di salah satu sudut SPBU dan menjadi lokasi antrean pengisian sepeda motor. "Mobil bisa saja mengisi apabila dipaksakan," ujarnya.

Akibat pemilihan lokasi tersebut, hampir 90 persen pengguna biopremium adalah pengendara sepeda motor. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, Risa menghendaki agar tangki biopremium dipindahkan di lokasi yang strategis sehingga lebih ramai pembelinya. Akan tetapi, hal itu tidak diperbolehkan.

kan.

Wira Penjualan Malan Pemasaran V Pertamina baya Edit mengungkapkan, dalam pengembangan biopertamax saat ini adalah masih terbatas ketersediaan etanol. Produk etanol pemasok Pertamina Molindo, biasanya menggemolase atau tetes tebu sebagai bahan pembuatan etanol tetapi, jumlahnya sangat terbatas meskipun Jatim memiliki gula terbanyak di Indonesia itu karena tetes tebu juga digunakan sebagai bahan baku industri makanan.

Sebaliknya, untuk meningkatkan pendapatan Pertamina volume penjualan biopertamax akan diperbesar. Pasalnya, biopertamax dijual sesuai dengan harga pasar internasional 6.600 per liter sehingga tidak subsidi harga yang harus digunakan dan mengakibatkan kerugian.

Untuk biopertamax ini, target konsumennya adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki mobil keluaran terbaru.

Guna mendorong penjualan biopertamax, selain membuka gerai penjualan, mengaktifkan sosialisasi melalui media massa dilakukan kerja sama dengan agen tunggal pemegang merek mobil (ATPM) ternama yang ada di Indonesia.

Akan tetapi, semua upaya tersebut menjadi sia-sia apabila salah kelangkaan bahan baku *biofuel* belum bisa diatasi. PT Molindo saat ini tengah berusaha meningkatkan produksi etanolnya dengan menggunakan tongkol atau ubi kayu sebagai bahan baku. Selain harganya lebih murah daripada molase, tan-singkong juga sangat mudah dibudidayakan.

Adapun daerah yang dilirik untuk mengembangkan singkong adalah Lampung, di samping Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 38		

TAHUN 2007

KRITIK TERHADAP "BIOFUEL"

Seperti Hantu di Tanah Sendiri

Persoalan energi adalah isu panas karena tidak ada kegiatan manusia modern yang tidak membutuhkan energi. Karena itu, dimensi politik (dan ekonomi) masalah ini sangat dominan. Dalam sidang pleno Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Brasil tahun 1992, Presiden George Bush (senior) menegaskan, "Gaya hidup kami tidak untuk dinegosiasikan."

Oleh MARIA HARTININGSIH

Ketika Presiden George W Bush (yunior) melakukan kunjungan ke Brasil beberapa waktu lalu, ia disambut lebih dari 6.000 pendemo. Mereka menentang program energi etanol di Brasil yang didorong Washington.

Program-program khusus di Departemen Energi AS beberapa tahun terakhir ini memang dikonsentrasikan untuk mengganti 75 persen impor bahan bakar minyak dari Timur Tengah.

Seperti diungkapkan Dennis McGrew, CEO dari NatureWorks yang dijumpai dalam Pameran Bio 2006 di Chicago, itu juga merupakan komitmen Bush untuk energi terbarukan dan upaya AS mengurangi emisi karbon dioksida (CO₂).

Natural Resource Defense Council (2004) AS memprediksi tahun 2050 produksi biodiesel di AS akan mencapai 140 miliar galon atau separuh dari konsumsi bahan bakar minyak di sektor transportasi. Emisi gas rumah kaca di AS pada tahun itu akan turun sampai 1,7 miliar ton per tahun, setara dengan 80 persen

emisi CO₂ yang dihasilkan oleh transportasi pada tahun 2002.

Namun, meluasnya lahan untuk tanaman bahan bakar nabati membuat harga jagung untuk pangan di pasaran naik sampai dua kali lipat. Terjadi kompetisi antara penggunaan jagung untuk kepentingan pangan, kosmetik, serta farmasi dan penggunaan jagung untuk bahan bakar nabati.

Itulah salah satu sebab mengapa AS mencari kemungkinan baru untuk mendapatkan bahan baku energi terbarukan itu dari im-

por yang harganya bisa ditekan kalau berasal dari negara-negara yang secara politik (dan ekonomi) bergantung pada AS.

Harga bahan baku nabati (kandela, kedelai, dan sawit) di dalam negeri di AS memang lebih mahal. Harian *The Seattle Times* (14/02/2007) memberitakan, harga minyak sawit impor dari Malaysia lebih murah 60 sen per galon dibandingkan dengan minyak kedelai dari Pantai Barat. Besarnya komponen transportasi dan bahan baku mencapai 80 persen dari seluruh ongkos produksi.

Koordinator Nasional Small Grant Program Global Environment Facility (SGP-GEF) Avi Mahaningtyas mengingatkan, proses pembuatan bahan bakar dari tumbuhan membutuhkan energi lebih besar sehingga sebenarnya tak memberikan sumbangan pada penurunan emisi CO₂ di atmosfer.

Laporan penelitian terbaru para ilmuwan dari Universitas Cornell dan Universitas California di Berkeley, AS, yang diterbitkan *Natural Science Research* memperlihatkan proses bahan bakar nabati membutuhkan energi yang lebih tinggi.

Jagung, misalnya, membutuhkan energi 29 persen lebih besar daripada proses produksi bahan bakar dari energi fosil, rumput-rumputan 45 persen lebih besar, biomas kayu 57 persen, kedelai 27

persen, dan dari tanaman bunga matahari 118 persen!

Dalam kasus sawit di Indonesia, penelitian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), seperti dipaparkan Wakil Direktur Walhi Farah Sofa, memperlihatkan proses oksidasi dari satu hektar lahan gambut untuk lahan penanaman sawit per tahun diperkirakan menghasilkan 100 ton emisi CO₂.

Studi Wetlands International bekerja sama dengan Delft Hydrology Institute Belanda menempatkan Indonesia ke jajaran penyumbang emisi CO₂ terbesar di dunia. Emisi CO₂ rata-rata per kapita per tahun di Indonesia adalah sekitar 15 ton, sekitar 14 ton berasal dari perusakan hutan. Saat ini terdapat sekitar 6,04 juta

hektar lahan yang dikonversi untuk penanaman sawit.

Padahal, kata Rudi Lumuru dari Sawit Watch, pemerintah merencanakan penambahan 20 hektar untuk perluasan penanaman kelapa sawit. Hutan Papua menjadi "ladang" berikutnya.

Padahal, semua ini tidak menjawab kebutuhan akan energi terbarukan. Apalagi, biodiesel dari minyak sawit hanya berfungsi sebagai pencampur solar untuk mengurangi tingkat pencemaran buangan yang dihasilkan bahan bakar solar.

Tata sosial-ekologis

Peneliti bidang-bidang yang terkait dengan perencanaan regional, Dr Hendro Sangkoyo, mengingatkan, persoalan energi

tidak bisa dilihat sebagai faktor independen.

Dalam sebuah seminar, ia mengoreksi pendekatan teknis-ekonomik dalam soal energi dengan mengingatkan dimensi politik, ekonomi, dan tentu saja, sosial-ekologis dari tata konsumsi energi. Kesepakatan untuk menghambat laju pemanasan biosfir, walaupun benar, tidak serta-merta mengandung pemecahan sosial ekologis bumi.

Karena itu, seperti dikemukakan Rudi Lumuru, pemerintah seharusnya memiliki strategi dan mengembangkan perkebunan sawit sesuai dengan standar keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, dan terutama sosial-ekologis, seperti tercapuk dalam Roundtable on Sustainable Palm

Oil, yang antara lain mencakup perlindungan hukum atas lembaga dan hak adat, termasuk dampak perluasan penanaman kelapa sawit terhadap komunitas lokal dan masyarakat adat.

Isu keamanan

Direktur Eksekutif Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Darwina Sri Widjanti juga mengingatkan, isu keamanan dan kedaulatan pangan, keamanan energi dan keamanan keragaman hayati dengan kebijakan perluasan lahan untuk penanaman sawit akan saling bertumbukan. Kepentingan rakyat akan selalu dikorbankan.

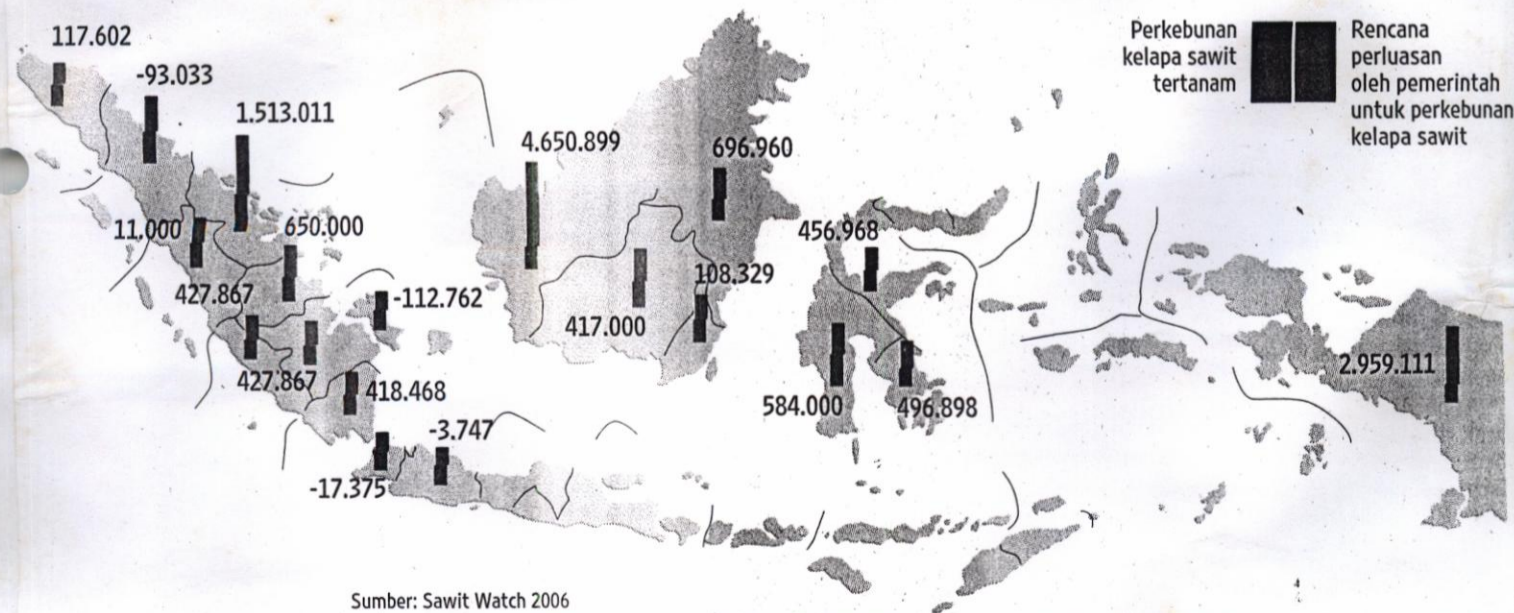
"Kalau dasarnya memenuhi kebutuhan pasar dan kompetisi untuk menguasai pasar sawit dunia, khususnya dengan Malaysia, kita yang terpuruk karena yang digunakan oleh Malaysia juga lahan kita," ujar Farah.

Rudi dan Farah mengingatkan, yang paling penting adalah *equity* dan keadilan. "Pengembangan *biofuel* dengan model industrialisasi yang insentifnya lebih banyak diberikan pada perusahaan besar akan memicu konflik di masyarakat," kata Farah.

Sawit Watch mencatat, sampai tahun 2006 terjadi sekitar 350 konflik tanah terkait dengan penolakan perluasan penanaman kelapa sawit. Konflik ini tidak terselesaikan dan akan memburuk dengan kebijakan *biofuel* dari pemerintah.

Komunitas lokal dan masyarakat adat akan semakin tersingkir. Seperti judul laporan Sawit Watch yang dikutip dari ucapan mereka, "Sekarang kami seperti hantu di tanah kami sendiri..."

WILAYAH-WILAYAH PERLUASAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA (HEKTAR)



get *biofuel* juga mulai memperanyakannya secara kritis. Target penyediaan biodiesel telah ditetapkan meningkat secara berkala dari 2 persen pada tahun 2006 menjadi 6 persen pada tahun 2010 dan 20 persen pada tahun 2020.

Tentu saja target-target tersebut telah diikuti dengan tambahan pemberian subsidi sebesar 45 euro per hektar kepada petani untuk memproduksi *biofuel*. Di Eropa, tanaman yang cocok untuk pengembangan *biofuel* adalah *rapeseed* yang mampu mencapai produktivitas 3-3,5 ton per hektar.

Konversi yang umum dilakukan adalah satu ton *rapeseed* mampu memproduksi 415 kilogram biodiesel sehingga satu hektar lahan mampu menghasilkan 1,45 ton bahan bakar nabati ini.

Singkatnya, kebutuhan areal untuk *biofuel* (terutama dari *rapeseed*) di Eropa adalah 26 juta hektar, yang berarti akan nyaris mengubah seluruh areal tanaman pangan menjadi tanaman *biofuel*. Apabila skenario di atas menjadi kenyataan, berarti penyediaan pangan akan mengalami ancaman yang sangat serius.

Para ahli pertanian di AS juga mulai mempertanyakan argumen "ramah lingkungan" yang diharapkan setelah konsumsi minyak bumi dikurangi dan diganti dengan *biofuel*.

Apabila dunia saat ini menghadapi pemanasan global karena tingginya emisi karbon dari pemakaian energi oleh industri dan alat transportasi, konversi kepada *biofuel* pasti bukan jawaban linier yang mampu mengurangi pemanasan global.

Logika sederhananya adalah bahwa dengan "membakar" minyak kelapa sawit, *rapeseed*, jagung, tebu, atau minyak jarak adalah mengembalikan kembali gas karbon yang dengan susah payah ditambat oleh tumbuhan

untuk diubah menjadi buah, batang, atau biji.

Artinya, konversi penggunaan BBM kepada BBN justru dapat berkontribusi lebih besar pada fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dunia.

Profesor David Pimentel (Universitas Cornell) dan Profesor Tad Patzek (Universitas California-Berkeley) telah melakukan penelitian mendalam dan sampai pada kesimpulan bahwa produksi jagung untuk keperluan etanol justru memerlukan tambahan 29 persen energi dari BBM dibandingkan dengan potensi *biofuel* yang dihasilkan.

Demikian pula, untuk memproduksi biomas kayu justru memerlukan tambahan 57 persen energi dari BBM dibandingkan dengan potensi *biofuel* yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka debat publik tentang dampak *biofuel* terhadap nasib penyediaan pangan dan perubahan iklim masih akan terus berkembang ramai. Skeptisme para peneliti pangan dan pejuang lingkungan hidup untuk mengatasi pemanasan global adalah tantangan besar bagi mereka yang bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati.

Tantangan praksis kebijakan

Praksis kebijakan pengembangan bioenergi di Indonesia juga mengalami tantangan yang tidak ringan. Berdasarkan target-target yang digariskan dalam "Blueprint Energi Nasional", tahun 2007 ini akan dihasilkan biodiesel sebesar 100 ribu kiloliter, dari 13,2 juta kiloliter kebutuhan solar di dalam negeri.

Sektor pertanian diharapkan mampu menyediakan biodiesel lebih besar dari cetak biru (*blueprint*) tersebut, yaitu sebesar 132.000 kiloliter, yang berasal dari minyak sawit 125.000 dan jarak

pagar 7.000 kiloliter.

Target-target tersebut meningkat secara gradual sampai 785.000 kiloliter biodiesel pada tahun 2010, yang berasal dari minyak sawit 471.000 kiloliter dan 314.000 kiloliter dari jarak pagar.

Beberapa langkah yang dilakukan berbagai instansi pemerintah di tingkat pusat (baca: proyek) pengembangan *biofuel* juga telah dilakukan. Pencanaan dan peresmian juga dilakukan oleh pejabat, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Bahkan, beberapa provinsi dan kabupaten/kota telah secara eksplisit membuat instruksi untuk memperluas areal kelapa sawit dan jarak pagar.

Apakah praksis kebijakan pengembangan *biofuel* ini hanya dijadikan justifikasi untuk mengonversi hutan produksi sebagai penambat karbon utama dan sumber keanekaragaman hayati bagi pelestarian lingkungan hidup, maka sejarahnya yang akan mencatatnya.

Tantangan sumber penyediaan *biofuel* dari tanaman lain di Indonesia juga tidak kalah beratnya. Produksi gula tahun 2006 baru tercatat 2,3 juta ton, yang tentu saja sangat jauh dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi tahunan yang telah mendekati 4 juta ton.

Terlalu naif apabila produksi gula untuk keperluan pangan yang masih kurang tersebut justru akan dikonversi untuk keperluan energi. Demikian pula, produksi ubi kayu sebesar 20 juta ton masih cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan konsumsi-



nya. Apalagi ubi kayu dan jarak pagar memang bukan komoditas unggulan karena agronomisnya yang "rakus" hara tanah. Implikasinya adalah peluang pengembangan secara massal pasti sangat terbatas jika tidak disertai perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan yang memadai.

Namun, pemerintah memang diberi mandat untuk melaksanakan amanat rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin keberlanjutan hidupnya. Kata kuncinya adalah kredibilitas dan wibawa lembaga publik untuk secara bijaksana mempertimbangkan untung-rugi dari praksis kebijakan yang diambilnya.

PROF DR BUSTANUL ARIFIN
Guru Besar Ilmu Ekonomi
Pertanian Unila dan Ekonom
Senior di Institute for Natural
and Regional Resources
(INRR), Bogor

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 36

TAHUN 2007

KEMITRAAN PETANI-INDUSTRI

Menjadi Pemain atau Penonton?

Mulyani, petani singkong dari Desa Tri Tunggal, Kecamatan Waway Karya, Lampung Timur, Selasa (22/5), terlihat gembira. Senyum lebar dan sinar mata yang bersinar tergambar jelas di wajahnya ketika ia mencermati gundukan tanah tempat ia menanam singkong sambung.

Oleh HELENA F NABABAN

Betapa ia tidak bergembira? Saat ini harga singkong di tingkat petani di Lampung cukup tinggi, sekitar Rp 300 hingga Rp 335 per kilogram. Harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga singkong selama lima tahun terakhir yang hanya dihargai Rp 180 hingga Rp 200 per kilogram.

Harga tinggi terjadi akibat rendahnya produktivitas, sementara saat ini permintaan pasar tinggi. Salah satu faktornya, muncul pabrik etanol atau pabrik energi alternatif terbarukan berbahan baku singkong di Lampung.

Di antaranya Medco Energy di Prokimal, Lampung Utara; PT Acida Tama di Lampung Tengah; PT Madusari Lampung Indah di Sekampung Udik, Lampung Timur; dan beberapa investor asal Korea yang saat ini tengah melakukan studi kelayakan.



KOMPAS/HELENA F NABABAN (HLN)

Petani ubi kayu berusaha mengangkat ubu kayu varietas unggul Darul Hidayah di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, beberapa waktu lalu. Petani singkong di Lampung Timur saat ini bersemangat menanam singkong karena adanya jaminan pasar dan harga melalui pola kemitraan dengan PT Madusari Lampung Indah.

“

Di balik pasar yang terbuka lebar, semangat petani muncul karena adanya jaminan pasar.

Masing-masing pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda, antara 180.000 liter hingga 60 juta liter etanol per tahun. Artinya, penyerapan singkong sebagai bahan baku akan menjadi lebih besar. Artinya lagi, penyerapan tenaga kerja pertanian juga akan menjadi lebih besar.

Petani pun bersorak karena pasar singkong kini terbuka lebar. Tidak hanya untuk pabrik tepung tapioka yang daya serapnya rendah dan sering mempermainkan harga di tingkat petani, tetapi kini petani juga bisa memasok singkong untuk pabrik etanol.

"Saya sekarang semangat menanam singkong," kata Mulyani. Semangat itu ia tularkan pula kepada anggota kelompok taninya. Hasilnya, lahan seluas 15 hektar milik 15 petani sekarang penuh ditanami singkong sambung siap panen.

Model kemitraan

Di balik pasar yang terbuka lebar, semangat petani muncul karena adanya jaminan pasar. Salah satu produsen bioetanol, PT Madusari Lampung Indah (MLI), telah membuat kesepakatan dengan petani melalui model kemitraan.

Berdasarkan kesepakatan itu, perusahaan akan meminjam setiap petani modal berupa bibit singkong sambung siap tanam, obat-obatan, pupuk kimia, pupuk organik, dan bimbingan teknis budidaya untuk meningkatkan produktivitas. Melalui kemitraan itu, peningkatan produktivitas dari 16,6 ton per hektar menjadi 60 hingga 75 ton per hektar merupakan kata kunci.

Selain itu, pabrik juga menjamin akan membeli singkong produksi petani dengan harga basis Rp 280 per kilogram dengan kadar ACI minimal 25 persen. Semakin tinggi kadar ACI dalam singkong, petani akan mendapat bonus yang ditambahkan pada nilai pembelian. Kesepakatan harga itu akan berlaku untuk tiga tahun.

"Harga kesepakatan itu lebih kecil dibandingkan dengan harga pasaran saat ini. Namun, harga itu akan berbicara apabila kami mampu memproduksi hingga 50 ton per hektar. Coba bandingkan

dengan produksi kami sebelumnya yang hanya 16 ton per hektar," kata Pendi, Ketua Kelompok Tani Adi Rukun Desa Purwa Tani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

Manajer Umum PT MLI Tito Tambayong menjelaskan, untuk bisa memproduksi etanol secara kontinu, kemitraan yang dibarengi dengan jaminan pasar menjadi jawaban supaya pasokan bahan baku aman. Itu karena untuk menghasilkan satu liter etanol, setidaknya dibutuhkan 6,5 kilogram singkong.

Sebagai perusahaan yang serius mengembangkan bioetanol dengan kapasitas produksi 50 juta liter etanol per tahun, PT MLI saat ini sudah menggarap sekitar 1.600 hektar dari total target kemitraan 4.000 hektar. Lebih dari 900 petani di Lampung Selatan dan di Lampung Timur dilibatkan dalam kemitraan singkong itu.

Luasan yang digarap itu belum seberapa apabila dibandingkan dengan potensi lahan singkong di Lampung yang sekitar 300.000 hektar dan potensi lahan kering di Lampung yang mencapai satu juta hektar.

Sayang, produktivitas singkong Lampung masih tergolong rendah sekitar 16,6 ton per hektar. Namun, produksi sebesar 4.984 juta ton singkong per tahun tetap menjadikan Lampung sebagai penghasil singkong terbesar di Indonesia.

Niti Soedigdo, Ketua Koperasi Unit Desa Tani Makmur Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, mengungkapkan, kemunculan pabrik etanol di Lampung saat ini mengembalikan singkong sebagai primadona pertanian. Kalau selama ini petani asal menanam tanpa dibarengi upaya budidaya yang benar, sekarang ini petani sudah mulai membenahi perilaku budidaya.

Apalagi, berdirinya pabrik-pabrik etanol itu sekaligus menjadi *buffer* atau penyangga harga komoditas karena mampu menyerap bahan baku dalam jumlah besar. Harga yang ditawarkan pun menguntungkan pe-

tani sehingga memampukan petani untuk memiliki posisi tawar yang kuat.

Sekarang ini, petani Lampung menanam singkong hanya sebagai bahan baku tepung tapioka. Dengan harga impor tepung tapioka yang murah, sementara satu-satunya pasar singkong adalah pabrikan tepung tapioka, dengan mudah harga ditentukan industri tapioka.

"Selama ini petani tidak memiliki alternatif pembeli. Pabrik etanol akan menjadi alternatif pasar bagi petani singkong," katanya bersemangat.

Kedekatan pabrik dengan bahan baku serta kemungkinan peningkatan produktivitas bahan baku itu akhirnya menjadi daya tarik beberapa investor datang ke Lampung dalam kurun waktu 2005-2007. Alasan itu cukup beralasan karena akan menghemat biaya produksi.

"Di sinilah keuntungan mendirikan pabrik etanol di Lampung. Terlebih secara infrastruktur industri, seperti jalan dan pelabuhan untuk ekspor, Lampung sudah siap," tutur Kepala Bidang Teknologi Etanol dan Derivatif Balai Besar Teknologi Pati (B2TP) Lampung M Arif Yudiarto.

Menguntungkan

Untuk bisa menghasilkan satu liter etanol, dibutuhkan 6,5 kilogram singkong. Apabila harga satu kilogram singkong saat ini sekitar Rp 350, dikurangi biaya angkut dan potong Rp 80, maka harga satu kilogram singkong menjadi Rp 270.

Untuk setiap 6,5 kilogram singkong, produsen membeli Rp 2.600 dari petani. Ditambah ongkos proses produksi dan bunga bank, setidaknya produsen mengeluarkan biaya Rp 5.100 untuk memproduksi satu liter etanol. Saat ini harga jual etanol ke industri sekitar Rp 5.300 per liter.

Coba bandingkan dengan besaran subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membeli BBM premium, dan mengolahnya supaya menjadi premium yang bisa dijual seharga Rp 4.500 per liter. Atau bandingkan juga dengan anggaran yang dipakai pemerintah untuk membeli BBM pertamax yang memiliki bilangan oktan maksimal 91 atau standar Eropa?

Memakai etanol sebagai bahan bakar, selain murah dan menghemat anggaran, juga menguntungkan. Selain bisa tetap terbarukan, gabungan etanol dan premium akan menghasilkan gasohol yang memiliki kandungan oktan sebesar 90 persen atau setara dengan pertamax yang memiliki kandungan oktan 91.

Bahkan, etanol sendiri dike-

tahui memiliki bilangan oktan 117 sehingga berdaya bakar tinggi, yang tidak saja berfungsi sebagai pencampur, tetapi juga sebagai aditif yang tidak mencemari lingkungan.

Tito mengatakan, dengan perkembangan harga minyak mentah dewasa ini, anggapan bioetanol lebih mahal daripada bahan bakar konvensional atau BBM tidak selalu benar. Melihat momentum di mana harga minyak dunia saat ini 60-65 dollar AS per barrel, dukungan politis pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk segera mengeluarkan instruksi mengenai pengurangan konsumsi BBM harus dilakukan.

Sama seperti yang dilakukan Presiden AS George W Bush di depan parlemen pada awal Januari 2007 yang menyatakan, AS akan mengurangi konsumsi bensin sampai sebesar 20 persen hingga tahun 2017.

Presiden SBY sendiri sebetulnya sudah menegaskan dalam peraturan presiden dengan kata "penggunaan", tetapi belum ditegaskan mengenai pengurangan konsumsi.

Padahal, dari rencana Presiden untuk mulai mengembangkan BE5 atau BE10 ke dalam satu liter premium, setidaknya akan mendorong bertumbuhnya pabrik-pabrik etanol yang berdampak pada terserapnya tenaga kerja pertanian dan ahli perkebunan yang lebih banyak.

Niti Soedigdo mengemukakan, keberpihakan pemerintah seperti itu sangat dibutuhkan petani karena bisa mengangkat petani. Petani cukup mendapat jaminan pasar dan kepastian harga yang didukung dengan kebijakan tegas sehingga petani akan ikut terangkat.

Arif mengatakan, dengan potensi yang demikian besar, sekarang ini tinggal keseriusan pemerintah. Apabila pemerintah serius mengurangi konsumsi BBM, pemerintah seharusnya bisa memberikan insentif yang sedikit lebih tinggi daripada harga jual ekspor yang diterima produsen sebagai bentuk dukungan.

Tujuannya supaya etanol produksi dalam negeri tidak banyak lari ke luar dan bisa dipakai di dalam negeri untuk mengurangi pemakaian BBM premium yang diperkirakan akan habis dalam 20 tahun.

Apabila pemerintah tetap saja berkatut dengan angka-angka subsidi dan tidak segera bertindak cepat, itu sama saja dengan pemerintah membiarkan potensi yang kaya terabaikan dan menjadikan Indonesia penonton dari semangat baru untuk mencari sumber energi terbarukan yang lebih murah.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 37

TAHUN 2007

Semua Bisa Mandiri Energi...

Enam bulan terakhir, Karnadi, warga Dusun Sono, Desa Bandungsari, Ngaringan, Grobogan, punya kesibukan baru. Pria berusia sekitar 60 tahun itu kini bertanam jarak bersama sepuluh rekannya yang tergabung dalam Kelompok Tani Sri Rejeki. Satu kelompok mendapat jatah menanam bibit jarak pada *demplo* seluas 2,5 hektar.

"Sampai sekarang sih belum menghasilkan. Mungkin baru beberapa bulan lagi panen," ujar Karnadi, yang menjabat sebagai ketua kelompok tani itu.

Selain bantuan bibit jarak, Karnadi juga mendapat bantuan kompor briket jarak. Bentuk kompor itu mirip dengan kompor minyak tanah biasa. Namun, bagian tengah kompor terdapat cekungan untuk menampung briket jarak.

Satu kompor bisa menampung sepuluh buah briket yang bisa digunakan untuk memasak selama dua jam. Dengan harga Rp 100 per butir, memasak dengan briket ini jelas jauh lebih irit dibandingkan dengan menggunakan minyak tanah. Apalagi, harga minyak tanah mencapai Rp 2.600 per liter.

"Tetapi, kompor itu belum pernah saya pakai," ujar Karnadi malu-malu. "Soalnya saya enggak mengerti cara memakainya. Apa kompor itu bisa dipakai seperti kompor minyak tanah, ya?" ujarnya sambil menunjukkan kompor yang masih terbungkus plastik.

Karnadi mengaku belum pernah mendapat pengarahan soal penggunaan kompor minyak jarak. Namun, dia sudah mendapat penyuluhan dari Dinas Kehutanan Grobogan soal bertanam jarak dan apa peranan minyak jarak di masa mendatang.

Karnadi adalah salah satu anggota dari 21 kelompok tani binaan PT Energi Hijau Lestari atau Enhil. Perusahaan itu mengolah biji jarak menjadi berbagai produk, seperti minyak jarak, briket, dan sabun. Produk-produk itu nantinya dipasarkan lagi kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi mandiri.

"Inilah yang dimaksud Desa Mandiri Energi, masyarakat tidak lagi bergantung pada pemerintah. Masyarakat bisa menyediakan sendiri sumber energinya," ujar Hartono, Direktur PT Enhil.

Kepastian harga

Untuk menciptakan DME memang tidak mudah. Yang utama, niat itu harus muncul dari masyarakat. Mereka bersedia menanam jarak, tetapi masyarakat kesulitan mengolahnya. Oleh karena itu, masyarakat harus mendapat kepastian bahwa biji jarak yang mereka tanam akan ditampung dan diolah oleh pabrik.

"Pabrik ini didirikan sebagai jaminan bahwa kami akan membeli biji jarak dari mereka," kata Hartono.

Setiap kelompok tani kecamatan itu diikat dengan perjanjian berupa kepastian pembelian dan kepastian harga. Dengan perjanjian itu, pasokan jarak dari petani terus mengalir sehingga pabrik bisa terus berproduksi.

Pabrik itu didirikan di atas lahan seluas 10.525 meter persegi dengan luas bangunan 1.200 meter persegi. Pabrik juga dilengkapi dengan tiga unit mesin *expeller* dengan kapasitas 2,5 ton, satu unit mesin pembuat sabun, satu unit mesin pengupas biji jarak, dan satu unit mesin pembuat briket.

PT Enhil membeli biji jarak

petani dengan kulitnya seharga Rp 700 per kilogram. Apabila sudah dikupas, harga biji jarak berkisar Rp 700-Rp 1.000 per kilogram. Perusahaan itu juga menerima jasa pengolahan biji jarak menjadi minyak jarak. Ongkos pengolahan minyak jarak adalah Rp 500 per liter.

Ampas jarak

Minyak jarak hasil olahan pabrik juga dijual dengan harga Rp 1.500 per liter. Sedangkan ampas jarak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk briket dan sabun antiseptik. Briket itu dijual dengan harga Rp 100 per buah dan sabun dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 500 per buah.

"Harganya sangat terjangkau bagi masyarakat kecil," kata Hartono. Dengan harga murah dan kembali ke masyarakat, banyak yang mempertanyakan dari mana PT Enhil mendapat keuntungan. "Saya hanya tertawa. Mereka lupa, jarak itu banyak sekali mendatangkan untung. Air cucian dan kulit jarak saja laku," ujarnya.

Air cucian biji jarak dibeli oleh sebuah perusahaan Korea. Air cucian jarak ternyata mengandung unsur NPK sehingga bermanfaat untuk pupuk. Sedangkan endapan dari hasil pengepresan biji jarak laku dijual hingga Rp 10.000 per kilogram. Konon, endapan itu

Padahal, waktu SBY mau datang, saya ikut kerja bakti. Tetapi, kok sekarang belum juga turun bantuannya.

Karnadi

Sebuah perusahaan Jepang juga membeli ampas minyak jarak seharga Rp 5.000 per kilogram. Ampas itu akan diteliti khasiatnya.

Melihat kesuksesan PT Enhil membina DME di Grobogan, banyak pemerintah daerah yang tertarik mengembangkan jarak di daerahnya. PT Enhil mendapat tawaran kerja sama dari tiga kabupaten, yakni Kendal, Rembang dan Blora.

Kebanyakan pemerintah daerah, kata Hartono, masih bingung soal konsep DME. Beberapa malah lebih mempersoalkan payung hukum. Padahal, sebagai misi sosial, pemerintah daerah tak perlu banyak tuntutan kepada masyarakat.

Biaya mendirikan DME sebenarnya cukup murah. Sedikitnya tersedia lahan seluas 250 hektar dan unit pengolahan minyak jarak mini (UPM). Biaya pembelian UPM cukup terjangkau, hanya sekitar Rp 20 juta.

"Seluruh desa sebenarnya bisa menjadi DME. Hanya saja yang penting kemauan masyarakat dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Karnadi mengaku senang mendapat bantuan bibit dan bertanam jarak. Apalagi, jarak bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarganya. Namun, dia masih mempertanyakan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan memberikan bantuan sebesar Rp 10 miliar bagi para petani jarak.

"Padahal, waktu SBY mau datang, saya ikut kerja bakti. Tetapi, kok sekarang belum juga turun bantuannya," katanya.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2007

ENERGI

Hess Stop Produksi, Pasokan Gas Jatim Terganggu

JAKARTA, KOMPAS — Pasokan gas untuk wilayah Jawa Timur terganggu akibat kebakaran yang terjadi di fasilitas pengeboran milik Hess Indonesia. Kejadian itu mengakibatkan suplai untuk pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Gresik terhenti.

Kepala Divisi Hubungan Pemerintah dan Masyarakat Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Amir Hamzah, Jumat (15/6), mengemukakan, produksi gas terpaksa dihentikan demi keselamatan.

Sumur produksi ikut terganggu akibat kebakaran di salah satu sumur pengembangan UPA-11 yang sedang dikerjakan Hess di

lepas pantai Ujung Pangkah, Jawa Timur, Kamis malam.

Gudang kimia di Rig MTR-1 terbakar. Meskipun api sudah bisa diatasi pada Jumat dini hari, kecelakaan kerja yang tidak menelan korban jiwa itu merembet pada fasilitas produksi gas.

Lapangan Ujung Pangkah dikelola oleh Hess sebagai operator bersama mitranya, ConocoPhillips. Ujung Pangkah mulai berproduksi Mei 2007.

Produksi gas sekitar 40 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan minyak 5.000 barrel per hari. Amir mengatakan, belum diketahui berapa kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut.

BP Migas masih meminta laporan lengkap dari Hess tentang penyebab kejadian tersebut. "Kami belum bisa memastikan berapa lama produksi bisa pulih lagi," ujar Amir.

Sebelumnya, Wakil Presiden Hess Bidang Relasi Eksternal Artis Waluyono mengatakan, kejadian itu tidak mengganggu aktivitas produksi.

Namun, Direktur Operasi PT Pembangkitan Jawa Bali Bagiyo Riawan mengatakan, penutupan fasilitas produksi gas Hess mengakibatkan suplai ke PLTGU Gresik distop.

"Sejak Kamis malam, Gresik sudah tidak terima gas dari Hess

yang biasanya sebesar 40 juta kaki kubik per hari," ujar Bagiyo.

Gas dari lapangan Pangkah dikirim melalui pipa bawah laut sejauh 9 kilometer ke PLTGU Gresik. Hess memiliki komitmen pasokan gas sebesar 100 MMSCFD ke PLN.

Selain dari Hess, PLTGU yang berkapasitas 3 x 500 megawatt itu mendapatkan pasokan gas dari Kodeco (85 MMSCFD) dan Energi Mega Persada (15 MMSCFD).

Sejak insiden ledakan pipa gas Pertamina November 2006, PLTGU Gresik harus membagi sebagian gasnya dari Kodeco dengan PT Petrokimia Gresik.

Bagiyo mengatakan, sampai akhir pekan ini PLTGU Gresik masih bisa mendapat pengalihan gas dari Petrokimia. Namun, mulai Senin depan, anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara itu harus menambah pemakaian bahan bakar minyak untuk menggantikan gas.

Dari tiga blok pembangkit yang ada di Gresik, ada dua blok yang bisa menggunakan BBM.

"Jadi, agar Gresik bisa beroperasi penuh, pemakaian BBM akan ditambah dari 2.500 kiloliter menjadi 2.900 kiloliter per hari. Kebetulan cadangan BBM cukup untuk kebutuhan 16 hari," kata Bagiyo. (DOT)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2007

Kelangkaan Minyak Tanah Masih Terjadi di Ambon

[AMBON] Kota Ambon masih mengalami kelangkaan minyak tanah hingga pertengahan Juni ini. Hal ini terbukti di sejumlah pengecer diakui stok minyak tanah habis dan belum diisi oleh para agen. Di sejumlah daerah, seperti di Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon terlihat antrean panjang.

Menyikapi kelangkaan ini, Ketua DPRD Kota Ambon, Lucky Wattimury, di Ambon, Kamis (14/6), meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon melakukan operasi pasar secara kontinu. Disperindag harus rutin melakukan operasi pasar agar bisa mengontrol para agen minyak tanah di Kota Ambon.

Diharapkan Pertamina sebagai lembaga yang mendistribusikan minyak tanah kepada masyarakat melakukan langkah antisipatif. Pemerintahan daerah (Pemda) dan Pertamina harus bisa mengambil langkah-langkah yang lebih baik guna mengatasi kelangkaan minyak tanah di Kota Ambon. Ini harus secepatnya dilakukan karena jika tidak segera diselesaikan maka warga masyarakat Kota Ambon akan merasakan akibatnya.

Langkanya minyak tanah di Kota Ambon satu bulan belakangan ini sangat meresahkan warga kota. Pada beberapa tempat agen minyak tanah terlihat tulisan "minyak tanah habis", walaupun ada minyak tanah dijual dengan harga bervariasi, padahal harga jual minyak tanah yang dikeluarkan oleh Pertamina Rp. 2500 per liter.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Maluku, Hanny Ohorella menga-

takan, kelangkaan minyak tanah di Kota Ambon, bukan disebabkan karena keterbatasan penyaluran dari pihak Pertamina, namun disebabkan karena agen yang nakal sehingga distribusi berjalan tidak teratur.

Evaluasi

Menurut Ohorella, hasil evaluasi sementara pada kawasan-kawasan tertentu yang merupakan tanggung jawab agen, kadangkala disalurkan ke lokasi-lokasi yang permintaannya cukup tinggi. Masalah penyalurannya tidak sesuai dengan distribusi yang telah ditetapkan ini menyebabkan agen mencari keuntungan. Sebenarnya bukan kelangkaan, tapi distribusi yang kurang teratur. Kuota untuk Maluku tetap tersedia, agen-agen sudah ditunjuk untuk bisa mengelola pada titik-titik yang sudah ditentukan.

Pemda sudah mengambil langkah preventif, dengan meminta Pertamina agar agen-agen segera menyalurkan minyak pada titik-titik yang mengalami kelangkaan. Operasi pasar sebanyak 9.000 liter sudah dilakukan di beberapa titik di antaranya Batu Merah, Galunggung, Kudamati. Enam titik yang sudah mulai diedarkan lagi yaitu, Wainitu, Waihaong, Belso, Galunggung, Batumerah dan Waiyame. Ini dilakukan oleh 10 agen yang telah ditunjuk Pertamina.

Menanggapi hal ini Kepala Disperindag Kota Ambon, F de Fretes mengatakan, minyak tanah di Kota Ambon belum mengalami kelangkaan. Stok yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan ke depan. [VL/M-11]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 13											TAHUN 2007																			

Shell wants clarity on govt rules for sale of subsidized fuels

Ika Krismantari
The Jakarta Post/Jakarta

The local arm of Royal Dutch Shell Plc., PT Shell Indonesia, said Friday that it would require clarification of the government's rules on the sale of subsidized fuels before it would get involved in the sector.

"We welcome the government's plan to encourage new players in the subsidized fuel distribution business, and if the regulations turn out to be appropriate and provide a level playing field, we will be interested," the newly-appointed president director of Shell Indonesia, Darwin Silalahi, told reporters Friday on the sidelines of the launching of the company's corporate social

responsibility program, Shell LiveWIRE.

Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas) head Tubagus Haryono said recently that his agency was studying the possibility of relaxing the existing regulations so as to allow private sector firms to sell subsidized gasoline, which accounts for about 95 percent of the country's fuel sales.

Without changes to the regulations, it will be difficult for the new players to become involved in the distribution of subsidized fuels.

However, many in the industry doubt that the government is really serious about relaxing the regulations.

The government removed Pertamina's monopoly over the sale of oil-based fuels in 2005, but the state-owned oil

and gas firm retains control over the subsidized-fuel market as, according to the government, the new entrants are unable to satisfy the set requirements. As a result, they are currently only allowed to sell non-subsidized high octane fuels.

Subsidized fuels include Premium gasoline, kerosene and diesel used by motorists, households and small businesses.

Besides waiting for clarification over the government's plans for the sale of subsidized fuels, Darwin said that Shell would also need to investigate further its economic feasibility, even though he acknowledged, "it would be a great opportunity for us to carve out a market beyond what we already have."

Shell currently sells non-

subsidized fuels under the trade names Shell Super and Shell Super Extra, and high-quality Shell Diesel, in 10 Shell gas stations in Greater Jakarta.

Shell was the first foreign company to enter Indonesia's retail gasoline business. Following Shell's arrival, Malaysian state oil and gas firm Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) has also set up shop here and currently operates two gas stations. It plans to open 21 more this year in Jakarta.

A number of global oil giants, including U.S.-based oil company Chevron, and France's oil giant, Total, are in the process of securing licenses from the government. Shell is also set to expand its business by establishing gas stations outside Java.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM								
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN: 37										TAHUN 2007	

BIJI JARAK

Mimpi Nelayan Padam

Namun, baru tiga bulan mengecap indahnyanya bekerja, Masrul kembali "menganggur". Namun, dia menganggur bukan karena dipecat, melainkan pabrik biodiesel itu untuk sementara berhenti beroperasi.

Pabrik yang terletak persis di sebelah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) milik Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Saroyo, Desa Lengkong, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, itu sehari-hari lebih banyak tutup. Masrul dan rekannya sesama operator tetap ke kantor, tetapi yang mereka lakukan hanya membersihkan alat-alat pengolah biji jarak itu dari debu.

"Pabrik ini hanya beroperasi sampai tiga bulan setelah diresmikan, setelah itu berhenti," ujar Masrul lesu.

Tidak hanya itu, lahan kosong di samping pabrik yang sedianya disediakan untuk lahan bertanam jarak (*Jatropha Curcas*) bersalin rupa. Lahan itu kini ditanami berbagai jenis umbi-umbian seperti singkong dan tanaman kacang. "Tanaman jarak akhirnya dibabat oleh warga karena pabrik tidak berproduksi. Lebih baik tanam yang lain," ujarnya.

Saat diresmikan pada 17 Februari 2006, banyak pihak menaruh harapan pada pabrik biodiesel ini. Saat itu, di hadapan para nelayan dalam acara sedekah laut, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi menyebutkan, proyek itu adalah langkah awal untuk mengentaskan kemiskinan.

Tak tanggung-tanggung, Departemen Kelautan dan Perikanan menyediakan 60 hektar lahan. Proyek yang dinamakan Proyek

Resminya, Masrul Rotin (20-an) adalah operator mesin pengolahan biji jarak di pabrik biodiesel pertama di Indonesia yang khusus untuk nelayan. Profesi yang cukup menjanjikan itu digenggamnya setelah dia menyisihkan puluhan calon lain yang sama-sama lulusan sekolah menengah kejuruan bagian teknik.

Oleh KHAIRINA

itu memiliki mesin pengolah biji jarak bernilai Rp 50 juta. Alat itu dapat menghasilkan 100 liter per shift (lima jam) sehingga jika dalam sehari dilakukan tiga shift, mesin itu dapat menghasilkan 300 liter biodiesel.

Hitung-hitungan di atas kertas, nelayan jelas lebih untung menggunakan minyak jarak. Biaya produksi minyak jarak hanya Rp 2.800 per liter. Setelah dicampur solar dalam takaran tertentu, harga biodiesel cuma Rp 3.800 per liter, jelas lebih murah dibandingkan dengan harga solar untuk nelayan yang mencapai Rp 4.500 per liter.

"Karena minyak jaraknya belum ada, kami terpaksa beli bensin seperti biasa," kata nelayan

yang ditemui tengah mengantre di SPBU itu.

Tidak kompak

Pabrik itu sendiri dilengkapi alat pengolah biji jarak yang relatif lengkap, kendati sederhana. Di dalam pabrik berukuran sekitar 20 meter persegi itu terdapat sebuah mesin genset model HT-12 Y merek Hatch, satu unit screw press (alat pemecah biji jarak) merek Tracon, dan satu unit mesin biodiesel merek Tracon.

Menurut Masrul, tutupnya pabrik berawal dari pasokan bahan baku yang tersendat-sendat. Jarak yang ditanam di lahan di samping pabrik belum siap panen. Padahal, untuk menghasilkan 150 liter minyak jarak sehari setidaknya dibutuhkan 600 kilogram biji jarak.

Untuk sementara, pabrik itu membeli biji jarak dari petani di daerah Kroya. Namun, petani meminta harga di luar batas kewajaran, Rp 15.000 per kilogram.

Untuk menghasilkan 1 liter minyak jarak, dibutuhkan 4 kilogram biji jarak. Apabila harga 1

kilogram biji jarak mencapai 15.000, untuk menghasilkan 1 liter minyak jarak dibutuhkan dana Rp 60.000. Harga ini jelas tidak ekonomis dibandingkan dengan harga jual bahan bakar fosil semacam solar dan premium.

"Kalau harganya setinggi ini untuk apa pakai minyak jarak? Lebih baik pakai solar saja sepele biasa," keluh Masrul.

Para nelayan di sekitar Desa Lengkong ternyata banyak yang belum mengetahui keberadaan pabrik itu. Mereka mengaku mengetahui saat pabrik itu direstusikan. Namun, karena tidak pernah menikmati hasil produksinya, nelayan tetap membeli solar dan bensin dari SPBU Lengkong.

Pimpinan Eksekutif PT Kreas Energi Indonesia—konsultan biofuel di Indonesia—Johan Beg Bukit mengatakan, minat menanam jarak di Indonesia berkembang sangat bagus sejak Mei 2006. Namun, karena pengelolanya, baik departemen terkecil maupun universitas, tidak kompak, industri ini tidak berjalan mulus.

Dia menggambarkan, minat petani yang besar untuk mena-

nam jarak, misalnya, ternyata tidak diimbangi dengan penyerapan hasil panen petani. Akibatnya, hasil panen menumpuk. Padahal, di sisi lain banyak industri yang membutuhkan bahan baku jarak.

Selama ini informasi yang diterima petani soal jarak memang kurang akurat. Mereka mengira jarak sama dengan "tanaman emas" sehingga petani mematok harga tinggi untuk tanaman jarak yang dihasilkannya. Padahal, konsep awal, jarak adalah tanaman sela yang memanfaatkan lahan-lahan tak terpakai dan tak terurus.

Menurut Johan, belum banyak pengarahan yang diberikan oleh pemerintah kepada petani jarak. Misalnya, hingga kini belum ada standar kualitas jarak. "Masih banyak yang harus dibenahi pemerintah," ujarnya.

Masrul juga berharap pemerintah memberikan perhatian khusus dan serius terhadap masalah jarak ini. Pabrik itu tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi Masrul, tetapi juga menjadi harapan bagi ribuan nelayan di pesisir Cilacap.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 35

TAHUN 2007

Bahan Bakar Nabati Menggantikan Bahan Bakar Minyak Fosil

Kenaikan harga minyak mentah dunia, yang mencapai lebih dari 65 dollar AS per barrel, memicu terutama negara-negara pengimpor minyak mencari sumber energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak fosil. Pilihannya jatuh pada bahan bakar nabati (dari tanaman) yang dianggap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan karena dapat diperbarui dalam jangka pendek. Bahan bakar jenis ini juga diklaim lebih ramah terhadap lingkungan karena emisi rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaannya lebih sedikit dibandingkan dengan bahan bakar minyak fosil.

Di Indonesia, Presiden Yudhoyono bertekad mewujudkan bahan bakar nabati sebagai salah satu sumber energi nasional. Selain sebagai solusi terhadap persoalan energi nasional, pengembangan bahan bakar nabati dianggap dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengangkat rakyat dari kemiskinan. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa pemanfaatan tanaman (sumber daya alam) yang tidak terkendali biasanya menimbulkan persoalan, bukan di masa kini, tapi di masa depan.



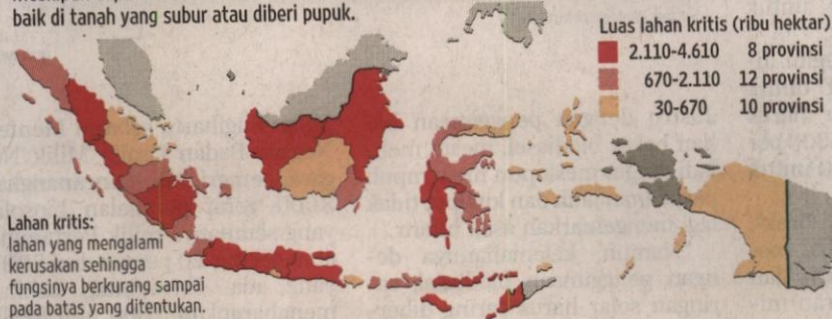
Bahan baku biji jarak

Perkebunan

Permasalahan di tingkat petani:
♦ Harga jual tidak seperti yang diharapkan
♦ Masalah distribusi

Lahan Kritis di Indonesia

Lahan kritis dan lahan rendah produksi dapat dimanfaatkan untuk ditanami tanaman Jarak. Meskipun dapat bertahan di tanah yang kurang subur, tanaman Jarak akan berproduksi lebih baik di tanah yang subur atau diberi pupuk.



Lahan kritis: lahan yang mengalami kerusakan sehingga fungsinya berkurang sampai pada batas yang ditentukan.

* Provinsi Irian Jaya Barat tidak ada data
* Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat masih bergabung dengan provinsi induk

Potensi pertanian:

- ◆ Luas lahan kritis di luar kawasan hutan hingga tahun 2002 sebesar 41,5 juta hektar
- ◆ Luas lahan kelapa sawit bertambah sekitar 1,85 juta hektar sehingga menaikkan produksi minyak kelapa sawit sebesar 100 persen (2000-2005).
- ◆ Luas panen ubi kayu (singkong) berkurang sekitar 75.000 hektar, tetapi jumlah produksinya meningkat sekitar 3,1 juta ton (2000-2005).

Kebijakan Tentang Bahan Bakar Nabati di Beberapa Negara

- Amerika Serikat:** permintaan bahan bakar nabati untuk transportasi pada 2012 diperkirakan mencapai 28,4 miliar liter.
- Brasil:** kandungan biodiesel dalam bahan bakar diesel harus mencapai 2% pada 2008 dan 5% pada 2013. Pemerintah mengupayakan distribusi keuntungan ekonomi yang lebih adil bagi petani miskin.
- Kolombia:** kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (bensin) harus mencapai 10% pada 2006.
- Kanada:** 45% penggunaan bahan bakar nasional harus mengandung 10% etanol pada 2010.
- Uni Eropa:** kontribusi bahan bakar nabati dalam penggunaan bahan bakar untuk transportasi harus mencapai 5,75% pada 2010.
- Jepang:** 20% kebutuhan minyak nasional harus digantikan dengan bahan bakar nabati atau bahan bakar "gas-to-liquid" (GTL) pada 2030.
- China:** kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (bensin) diupayakan mencapai 10%.
- Indonesia:** target penggunaan bahan bakar nabati mencapai 5% dari keseluruhan sumber energi nasional pada 2025.
- Malaysia:** target 5% kandungan biodiesel dalam bahan bakar diesel pada tahap awal.
- Thailand:** kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (bensin) harus mencapai 10% pada 2007.
- India:** penggunaan bahan bakar nabati diusulkan sebesar 20% dari keseluruhan sumber energi di India pada 2012.

Harga minyak Nymex Light Sweet Crude, Contract 1 (2000-2007)

Harga minyak bumi yang cenderung meningkat mendorong pencarian alternatif sumber energi bahan bakar nabati.



Sumber: BPS, BPPT, Menuju Desa Mandiri Energi, Rama Prihandono (2006), www.jarakpagar.com, Worldwatch I

Simulasi Keuangan* Produksi Biodiesel (dalam rupiah)

	Untuk Transportasi	Untuk Industri
◆ Harga jual	4.300 per liter	5.380 per liter
◆ Biaya produksi minyak kelapa sawit**	3.000 per kg	3.000 per kg
◆ Biaya produksi biodiesel**	1.000 per kg	1.000 per kg
◆ Harga pokok produksi	4.000 per kg = 3.636 per liter	4.000 per kg = 3.636 per liter
◆ PPN 10%	400 per kg	400 per kg
◆ PBB KB 5%	200 per kg	
◆ Harga pokok produksi dengan pajak	4.600 per kg = 4.182 per liter	4.400 per kg = 4.000 per liter
◆ Keuntungan produksi	664 per liter	1.744 per liter
◆ Rasio keuntungan produksi terhadap harga pokok produksi	0,18	0,48
◆ Proporsi biaya bahan baku terhadap harga pokok produksi	75%	75%

* belum memasukkan biaya distribusi
** angka perkiraan

nstitute, World Business Council-for Sustainable Development, US Department of Agriculture, PT Permodalan Nasional Madani

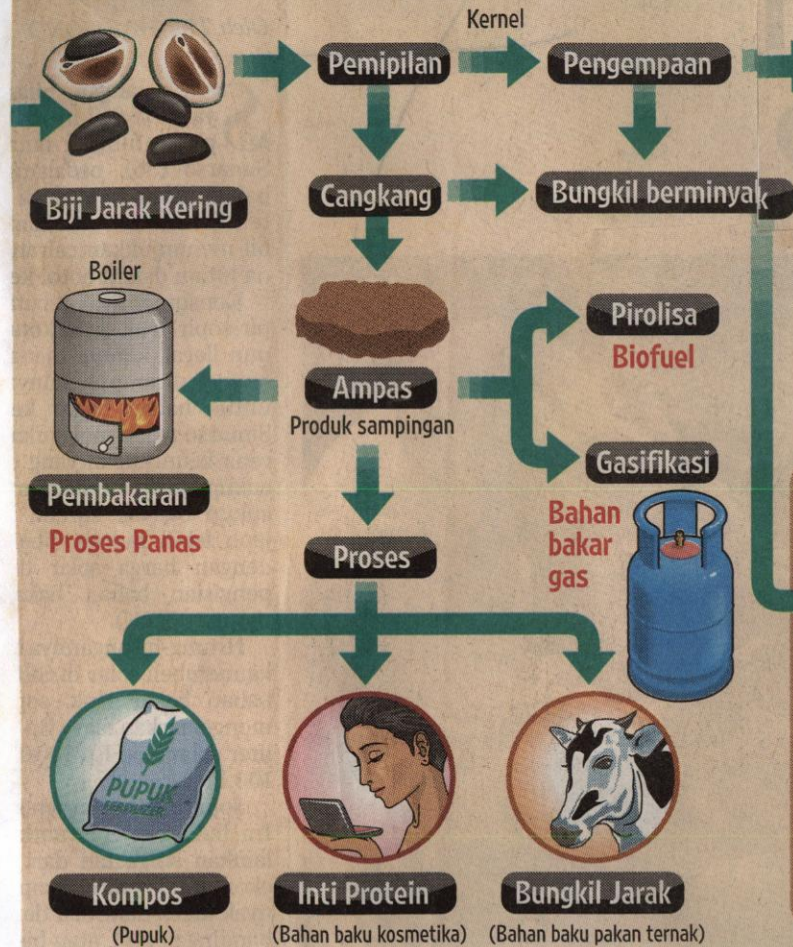
Perbandingan Pendapatan Petani



Keterangan	Kelapa Sawit	Jarak	Tebu
◆ Produktivitas per tahun	17 ton per ha	10 ton per ha	80 ton per ha
◆ Rendemen minyak	22%	35%	7%
◆ Hasil minyak per tahun	3,74 ton per ha	3,5 ton per ha	5,6 ton per ha
◆ Pendapatan per tahun	Rp 10,2 juta per ha	Rp 5 juta per ha	Rp 16 juta per ha
◆ Biaya produksi per tahun	Rp 5,83 juta per ha	Rp 0,6 juta per ha	Rp 12,2 juta per ha
◆ Keuntungan kotor per tahun	Rp 4,37 juta per ha	Rp 4,4 juta per ha	Rp 3,8 juta per ha

TEKS: LUHUR/LITBANG KOMPAS, GRAFIS: GUNAWAN

Proses Produksi Minyak Mentah Jarak Pagar dan Biodiesel



Minyak mentah jarak
(crude jatropha oil) 25%-38,5%

- Proses hingga minyak mentah jarak setara:
- ♦ Minyak tanah,
 - ♦ Minyak bakar
 - ♦ Minyak Jarak (untuk diesel)



Jarak Pagar (Jatropha curcas)

Jarak pagar adalah tumbuhan tropis semak berkayu yang berasal dari Amerika Tengah. Tumbuhan ini dikenal sangat tahan kekeringan dan mudah diperbanyak dengan stek. Jarak pagar dipandang menarik sebagai sumber biodiesel karena kandungan minyak pada bijinya yang tinggi, tidak berkompetisi untuk pemanfaatan lain (jika dibandingkan dengan kelapa sawit atau tebu), dan memiliki karakteristik agronomi yang sangat menarik.



Konsumen Industri Untuk Industri



Distribusi

Untuk Transportasi

Pencampuran

Ritel (SPBU)

- SPBU penyedia Biodiesel:
- ♦ Pertamina
 - ♦ Shell

Ramah Lingkungan

Bahan bakar campuran 20% biodiesel dan 80% minyak diesel memproduksi emisi rumah kaca 12-18% lebih sedikit dibanding minyak diesel murni.



Konsumen Pengguna Kendaraan Bermotor

- Permasalahan di tingkat ritel:
- ♦ Biaya produksi belum ekonomis
 - ♦ Tidak tersedia secara luas

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 36

TAHUN 2007

KONSUMEN

Dari "Irek" ke "Biofuel"

Oleh TRY HARIJONO

"Ssst... jangan bilang-bilang ya.... Biofuel ini untuk campuran minyak tanah," bisik Sunarso (36), pedagang eceran bahan bakar minyak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sambil menunjukkan cairan berwarna hitam dalam botol kemasan.

Konsumennya terutama sopir-sopir truk antarkota. Meskipun ilegal, karena menggunakan biofuel dicampur minyak tanah untuk bahan bakar kendaraan, Sunarso nekat melakukannya karena keuntungan yang diperoleh cukup besar. Konsumennya juga cukup banyak karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan harga solar di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).

Hitung-hitungannya begini. Jika membeli solar di SPBU untuk bahan bakar truk, sopir harus mengeluarkan biaya Rp 4.300 per liter solar atau Rp 430.000 untuk 100 liter.

Sopir bisa juga membeli "irek". Ini bukan sejenis narkoba, melainkan singkatan dari "irit dan ekonomis", yakni campuran minyak tanah dan solar dengan perbandingan 3 : 1, atau bisa juga 4 : 1.

Minyak tanah yang harganya Rp 2.500 per liter dicampur solar yang harganya Rp 4.300 per liter. Solar yang sudah dioplos menjadi "irek" harganya sekitar Rp 3.500 per liter. Pedagang biasanya menjajakan dalam jeriken-jeriken isi 20 liter dan pemandangan seperti ini banyak terlihat disepanjang pantai utara (pantura) Jawa Timur.

"Namun, penggunaan irek menyebabkan mesin cepat panas dan karet klep gampang rusak," ungkap Marwan Aziz (35), sopir truk yang biasa menempuh rute Denpasar-Surabaya-Jakarta.

Menyadari kelemahan ini, Sunarso yang sehari-hari menjual solar eceran di Kabupaten Pasuruan mencoba secara ilegal menggunakan biofuel campur minyak tanah. "Keuntungannya ternyata berlipat ganda dan sopir truk tidak lagi mengeluh mesinnya cepat panas," kata Sunarso.

Biofuel dia beli dengan harga Rp 12.000 per botol isi 1,5 liter dan dicampur dengan 40 liter minyak tanah yang harganya Rp 2.500 per liter. Berarti dia harus mengeluarkan modal Rp 112.000 untuk 40 liter bahan bakar oplosan yang mirip solar.

Bahan bakar biodiesel ini dia jual Rp 3.500 per liter atau Rp 140.000 untuk dua jeriken berisi 40 liter biodiesel. "Keuntungannya Rp 14.000 per jeriken. Padahal, dalam sehari, paling sedikit laku terjual 50 jeriken," kata Sunarso tertawa membayangkan keuntungannya sekitar Rp 700.000 per hari!

Sopir-sopir truk juga tidak lagi mengeluh mesinnya cepat panas.

Etanol dan Biodiesel

	Etanol	Biodiesel
 Produksi dunia	Brasil dan Amerika Serikat memproduksi 32,7 miliar liter etanol (sekitar 90 persen dari total produksi dunia) pada tahun 2005.	Uni Eropa memproduksi 3,6 milyar liter biodiesel (sekitar 89 persen dari total produksi dunia) pada tahun 2005.
 Bahan baku	Bahan baku utama produksi etanol di Brasil adalah tebu, sedangkan di Amerika Serikat adalah jagung.	Bahan baku utama produksi biodiesel di Uni Eropa adalah canola atau biji bunga matahari.
 Pengurangan emisi rumah kaca	Bahan bakar campuran 10 persen etanol dan 90 persen minyak (bensin) memproduksi emisi rumah kaca 3-4 persen lebih sedikit dibanding minyak murni.	Bahan bakar campuran 20 persen biodiesel dan 80 persen minyak diesel memproduksi emisi rumah kaca 12-18 persen lebih sedikit dibanding minyak diesel murni.

Sumber: Worldwatch Institute

GUNAWAN

Justru dengan penggunaan bahan bakar biodiesel, mesin menjadi dingin meskipun menempuh perjalanan jauh dan knalpot tidak lagi mengeluarkan asap hitam.

"Namun, kelemahannya dengan penggunaan biodiesel, saringan solar harus sering dibersihkan supaya laju kendaraan tetap kencang," kata Nasikun (42), sopir truk lainnya di Kabupaten Nganjuk, yang sering menggunakan biodiesel.

Illegal

Penggunaan *biofuel* untuk campuran minyak tanah merupakan tindakan ilegal. "Namun, produsennya, yakni pembuat *biofuel*, tidak bisa dipersalahkan. Kesalahan adalah di tingkat konsumen atau pemakai," ujar Harianto, Direktur Utama Multi Inovasi Mandiri (MIM) Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, lembaga yang memberikan pelatihan pembuatan biosolar.

Dia mengibaratkan pembuat pisau yang kemudian pisaunya dipakai konsumen untuk melukai orang lain. Menurut dia, biosolar mestinya dipakai untuk campuran solar sebanyak 5-10 persen. Hasilnya, selain lebih ramah lingkungan, penggunaan biosolar akan menyebabkan mesin diesel tetap dingin dan knalpot tidak akan mengeluarkan asap hitam yang mengganggu pandangan.

Jika memang sopir truk akan menggunakan biosolar, sudah tersedia SPBU yang menyediakan biosolar. Harganya sama dengan solar biasa, Rp 4.300 per liter. "Jadi tidak boleh dan ilegal jika mencampur *biofuel* dengan minyak tanah untuk menghasilkan biosolar," katanya.

Masalahnya, SPBU yang menjual biosolar masih sangat terbatas. Belum semua kota menyediakan SPBU biosolar. "Jika bahan bakar habis di perjalanan, terpaksa membeli solar biasa," kata H Nurohman (45), pelanggan setia SPBU biosolar di Jalan Jemursari, Surabaya.

Padahal, pada masa kepemim-

pinan Sugiharto sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, pemerintah mencanangkan 3.000 gerai penjualan biosolar yang semuanya milik Pertamina, atau sekitar 20 persen dari SPBU yang ada. Pemerintah bahkan mengharapkan 3.000 unit SPBU biosolar akan tercapai pada tahun 2010-2015.

Sugiharto saat itu juga mengingatkan, pencapaian target ini sangat tergantung dari pasokan masyarakat. Masalahnya, masyarakat juga enggan menanam jarak sebagai salah satu bahan pembuatan *biofuel* karena harganya sangat murah, hanya Rp 800 per kilogram biji jarak kering.

"Hasilnya memang lumayan, bisa 5 ton per hektar. Namun, dipotong biaya tanam, upah petik, dan ongkos transpor, keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Jauh lebih jika lahan yang ada dipakai untuk menanam padi, kacang tanah, dan kacang hijau," kata Har-di Siswanto (45), petani yang kapok menanam jarak.

Harianto, Direktur Utama Multi Inovasi Mandiri, perusahaan pembuat dan penjual biodiesel di Kabupaten Mojokerto, menjelaskan, untuk meningkatkan keuntungan petani, mestinya pemerintah jangan cuma menganjurkan petani menanam jarak sebagai bahan baku pembuatan biosolar, tetapi juga menyosialisasikan cara mengolah dan memasarkannya.

Jika dijual dalam bentuk minyak mentah biji jarak, harganya melonjak menjadi Rp 3.500 per liter. Adapun jika sudah disaring dan menjadi *biofuel*, harganya menjadi Rp 8.000 per liter.

"Keuntungannya sangat lumayan, namun sosialisasi pemerintah dan penyediaan mesin-mesin pembuat *crude oil* (minyak mentah) masih terbatas," kata Harianto yang merancang sendiri mesin pengupas, penggiling, dan penyaring minyak nabati dengan harga Rp 3,5 juta per unit serta bisa digunakan untuk kelompok petani.